

Peran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Modal Sosial

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP) merupakan wujud konkrit komitmen pemerintah untuk membantu masyarakat pesisir khususnya masyarakat nelayan agar keluar dari keterpurukan ekonomi dan kemiskinan. Secara umum program PEMP bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan penguatan kelembagaan sosial ekonomi dengan mendayagunakan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan.

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, tidaklah cukup hanya dengan mengandalkan program pemberdayaan saja. Seringkali jebaran kegagalan program terjadi karena implementasi program tidak sesuai dengan konsep yang menjadi referensinya. Perlu adanya penguasaan dan pengetahuan terhadap faktor karakteristik masyarakat, sosial budaya dan aturan norma masyarakat setempat. Sehingga hambatan pemberdayaan seperti kurangnya rasa saling mempercayai rendahnya daya inovasi atau kreativitas, sikap mudah pasrah dapat diminimalkan. Dengan demikian program peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir akan berlangsung secara beriringan antara program pemberdayaan masyarakat dengan penguatan kapasitas masyarakat pesisir yang bersumber dari sosial budaya dan norma masyarakat setempat, sehingga desain pembangunan masyarakat pesisir tetap berakar pada masyarakat itu sendiri.

Buku ini memberikan teori tentang pemberdayaan masyarakat dan modal sosial yang dimiliki masyarakat dan kami mencoba menghubungkan kedua faktor tersebut dengan kesejahteraan masyarakat pesisir. Selain itu, Buku ini membahas tentang pemberdayaan masyarakat, modal sosial dan kesejahteraan masyarakat pesisir yang ada di Kabupaten meranti dan Rokan Hilir.

Dr. Andreas, CPA., CA adalah star pengajar tetap pada Program S1 Akuntansi, Program Magister Manajemen, Program Magister Akuntansi, Program Magister Sains Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Riau, sekaligus menjadi Managing Partner Kantor Akuntan Publik Hadibroto & Rekan sejak tahun 2003 hingga kini. Pengalaman audit diperoleh dari Kantor Akuntan Publik yang sama sejak tahun 1989. Selain itu, penulis pernah bekerja sebagai internal auditor pada Raja Garuda Mas Group di Medan dan sebagai Wakil Ketua bidang Akuntan Publik. Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Riau. Penulis juga aktif sebagai pembicara pada berbagai konferensi internasional.



Dr. Enni Savitri, SE, MM. Ak. adalah dosen tetap pada jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau sejak tahun 2008, lahir di Pekanbaru. Pendidikan Sarjana Ekonomi dan Akuntansi (SE) diselesaikan pada jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Riau (1998). Pendidikan Masternya diselesaikan di Magister Manajemen (MM) Universitas Riau (2004) dan meraih gelar Doktor pada Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang (2012). Selain itu, penulis juga sebagai staf pengajar pada Magister Manajemen dan Magister Sains di Universitas Riau.



Dr. Andreas, CPA, CA
Dr. Enni Savitri, SE, MM. Ak



Peran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Modal Sosial

Dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Kabupaten Meranti dan Rokan Hilir



Andreas, Dr, CPA,CA
Enni Savitri, Dr. SE.Ak, MM

Peranan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Modal Sosial

Dalam Meningkatkan Kesejahteraan di
Kabupaten Meranti dan Rokan Hilir

**Peranan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Pesisir dan Modal Sosial
Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Di Kabupaten Meranti
Dan Rokan Hilir**

Penulis

Andreas, Dr, CPA,CA

Enni Savitri, Dr. SE.Ak, MM

Editor

Musfialdi, M.Si

Cetakan 1

Agustus 2016

Penerbit

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan /atau denda paling banyak Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)

PENGANTAR

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP) merupakan wujud konkrit komitmen pemerintah untuk membantu masyarakat pesisir khususnya masyarakat nelayan agar keluar dari keterpurukan ekonomi dan kemiskinan. Secara umum program PEMP bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan penguatan kelembagaan sosial ekonomi dengan mendayagunakan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan.

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, tidaklah cukup hanya dengan mengandalkan program pemberdayaan saja. Seringkali jebatan kegagalan program terjadi karena implementasi program tidak sesuai dengan konsep yang menjadi referensinya. Perlu adanya penguasaan dan pengetahuan terhadap faktor karakteristik masyarakat, sosial budaya dan aturan norma masyarakat setempat. Sehingga hambatan pemberdayaan seperti kurangnya rasa saling mempercayai rendahnya daya inovasi atau kreativitas, sikap mudah pasrah dapat diminimalkan. Dengan demikian program peningkatan

kesejahteraan masyarakat pesisir akan berlangsung secara beriringan antara program pemberdayaan masyarakat dengan penguatan kapasitas masyarakat pesisir yang bersumber dari sosial budaya dan norma masyarakat setempat, sehingga desain pembangunan masyarakat pesisir tetap berakar pada masyarakat itu sendiri.

Buku ini memberikan teori tentang pemberdayaan masyarakat dan modal sosial yang dimiliki masyarakat dan kami mencoba menghubungkan kedua faktor tersebut dengan kesejahteraan masyarakat pesisir. Selain itu, Buku ini membahas tentang pemberdayaan masyarakat, modal sosial dan kesejahteraan masyarakat pesisir yang ada di Kabupaten meranti dan Rokan Hilir.

Dalam penulisan buku ini, kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan oleh pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Untuk itu, kami dengan senang hati menerima kritikan dan saran dari semua pihak guna kesempurnaan penulisan selanjutnya. Kami ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan *serta dukungan*.

Pekanbaru, juli 2016

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	vii
Bab 1. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
Bab 2. Tinjauan Pustaka	15
A. Konsep Sosial Modal	15
B. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	23
Modal sosial dan Pemberdayaan Dalam	
C. pendekatan pembangunan <i>Bottom-up</i> (Level	
Mikro)	30
Modal Sosial dan Pemberdayaan dalam	
D. Pendekatan Pembangunan <i>Top-down</i> (Level	
Makro)	31
Modal Sosial dan Pemberdayaan Dalam	
E. Model Gabungan <i>Bottom-up</i> dan <i>Top-down</i>	
Pembangunan	31
F. Konsep Kesejahteraan Masyarakat	32
Bab 3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	35
A. Tujuan Khusus	35
B. Manfaat Penelitian	36
Bab 4. Metode dan Pembahasan Penelitian	37
A. Pendekatan Penelitian	37
B. Populasi dan Sampel Penelitian	37
C. Definisi Operasional Variabel	38

D.	Pembahasan Hasil Penelitian	41
1.	Pengaruh Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir terhadap Modal Sosial	41
2.	Pengaruh Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir terhadap Kesejahteraan	62
3.	Pengaruh Modal Sosial terhadap Kesejahteraan	74
4.	Pengaruh Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir terhadap Kesejahteraan Melalui Modal Sosial ..	93
	Bab 6 Kesimpulan dan Saran	99
A.	Kesimpulan	99
B.	Saran-saran	101
	Biodata Penulis	104
	Daftar Pustaka	105

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Klasifikasi kemiskinan berdasarkan kelompok sosial ekonomi	4
Tabel 1.2	Persentase Penduduk Miskin Menurut Propinsi	5
Tabel 1.3	Perbedaan sosial ekonomi dalam bidang kesehatan (studi kasus Senegal)	5

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 5.7	Salah satu SPDN di Pesisir Kab. Rokan Hilir	46
Gambar 5.8	Modal Usaha di Kabupaten Meranti	48
Gambar 5.9	Modal Usaha di Kabupaten Rokan Hilir	48
Gambar 5.10	Kondisi Kedai Pesisir di Kabupaten Rokan Hilir	51
Gambar 5.11	Kondisi Kedai Pesisir di Kabupaten Meranti	51
Gambar 5.13	Bentuk kerjasama antar nelayan	78
Gambar 5.14	Beberapa alat nelayan yang digunakan sesama anggota kelompok nelayan	79
Gambar 5.15	Salah satu contoh jaringan masyarakat nelayan	81
Gambar 5.16	Pelarangan Penggunaan Alat Tangkap yang merusak ekosistem laut	83

1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia terkenal memiliki potensi kelautan dan pesisir yang kaya. Hal ini sesuai dengan sebutan Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*). Potensi sumber daya pesisir Indonesia sangat luas mulai dari potensi sumber daya hayati, potensi wilayah, potensi sumber daya mineral dan energi, potensi industri, potensi transportasi dan jasa lingkungan (Lasabuda 2013). Potensi sumberdaya pesisir di Indonesia dapat digolongkan sebagai kekayaan alam yang dapat diperbaharui (*renewable resources*), tidak dapat diperbaharui (*non-renewable resources*), dan berbagai macam jasa lingkungan (*environmental service*). Salah satu potensi besar sumber daya hayati Indonesia adalah perikanan.

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi sumberdaya alam perikanan. Luas wilayah lautan atau perairan di provinsi Riau 235.366.Km2 atau 71,33% dari luas total wilayah provinsi Riau. Bahkan jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983, maka dengan kewenangan atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang telah disepakati luas Provinsi Riau bertambah menjadi 379.000 Km2. Jumlah pulau besar dan kecil 3.214 buah dengan perairan pantai sepanjang 1.800 mil, hutan bakau (mangrove) seluas 300.000 hektar dan kawasan pasang surut seluas 3.920.000 hektar.

Dengan pulau-pulau yang tersebar dan luas lautan atau perairan yang besar tersebut, maka Provinsi Riau memiliki sumberdaya alam perikanan melimpah. Potensi sumber daya alam perikanan ini potensial untuk dikembangkan. Orientasi kebijakan ini sangat tepat, mengingat potensi sumberdaya minyak dan gas serta hutan yang telah digarap selama ini telah menunjukkan penurunan (*levelling off*) yang sangat signifikan. Oleh karena itu pembangunan sumberdaya pesisir dan lautan diharapkan akan dapat menjadi alternatif dan sumber pertumbuhan baru bagi berkesinambungan pembangunan khususnya masyarakat pesisir di wilayah Provinsi Riau.

Secara normatif, seharusnya masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang sejahtera mengingat besarnya potensi sumber daya alam pesisir dan laut. Namun kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat pesisir, terutama nelayan masih merupakan

bagian dari masyarakat yang tertinggal. Hal ini sangat kontradiktif jika dibandingkan dengan potensi sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia yang sangat berlimpah tetapi masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya dari sektor kelautan hidup dalam kemiskinan.

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang belum ada habisnya untuk dibahas. Pada tahun 2011 dari 31,02 juta orang penduduk miskin, 25,14% atau 7,87 juta orang diantaranya tinggal di pesisir yang tersebar 10.640 desa. Dari angka tersebut maka masyarakat pesisir setidaknya menyumbang seperempat angka kemiskinan di Indonesia. Masih besarnya jumlah penduduk miskin menimbulkan pertanyaan apakah pembangunan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah mengalami kegagalan. Kemiskinan merupakan salah satu indikator yang paling jelas dalam menunjukkan keberhasilan pembangunan nasional.

Jika garis kemiskinan dan pengukuran telah ditetapkan, berbagai karakteristik kelompok yang berbeda (miskin dan sangat miskin) dapat dibandingkan untuk melihat korelasi kemiskinan. Dapat pula dibandingkan ukuran kemiskinan kelompok keluarga miskin dari karakteristik yang berbeda dalam kurun waktu tertentu. Contoh penyajian data untuk analisis kemiskinan seperti pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Klasifikasi kemiskinan berdasarkan kelompok sosial ekonomi

Kelompok sosial ekonomi	Head count	Ranking	Kesenjangan	Ranking	Keparahan	Ranking
Petani kecil	81.6	1	41.0	1	24.6	1
Petani besar	77.0	2	34.6	2	19.0	2
Buruh kasar	62.7	3	25.5	4	14.0	5
Nelayan	61.4	4	27.9	3	16.1	3
Pensiunan/penyandang cacat	50.6	5	23.6	5	14.1	4

Sumber: World Bank 1996 – Madagascar 1994

Dalam melakukan analisis harus diingat bahwa perbedaan karakteristik di antara kelompok berbeda, atau perbedaan persentase penduduk miskin di antara kelompok yang berbeda atau kurun waktunya haruslah secara statistik signifikan.

Langkah pertama dalam menyusun profil kemiskinan adalah dengan menganalisis karakteristik dari kelompok sosial ekonomi yang berbeda ditinjau dari penghasilan atau konsumsinya. Data ini akan memberikan pemahaman siapa yang miskin dan apa perbedaan antara yang miskin dan tidak miskin. Ketika melakukan analisis akan lebih baik jika memisahkan data pada tabel yang diharapkan bisa menunjukkan perbedaan yang nyata. Seperti pada tabel 1.2 yang menunjukkan informasi tentang indikator yang ada di desa dan kota.

Tabel 1.2
Persentase Penduduk Miskin Menurut Propinsi, 2011

Propinsi	Persentase penduduk miskin			Garis kemiskinan (Rp)			P1 (%)			P2 (%)		
	Kota	Desa	Kota+desa	Kota	Desa	Kota+desa	Kota	Desa	Kota+desa	Kota	Desa	Kota+desa
NAD	13,69	21,87	19,57	333355	292085	303692	2,78	3,78	3,50	0,84	0,98	0,94
Sumatera Utara	10,75	11,89	11,33	271713	222226	246560	1,84	1,85	1,84	0,53	0,49	0,51
Sumatera Barat	7,42	10,07	9,04	293018	241924	261719	1,25	1,42	1,36	0,35	0,36	0,35
Riau	6,37	9,83	9,47	306504	267007	282479	0,77	1,48	1,21	0,16	0,37	0,29
Jambi	11,19	7,53	8,65	284522	210144	242272	1,31	0,81	0,96	0,26	0,14	0,18
dst												

Sumber: BPS 2012

Tabel diatas menunjukkan bahwa kemiskinan di Indonesia lebih dalam terjadi di perdesaan daripada area perkotaan, bukan hanya persentase, namun juga tingkat kesenjangan dan keparahannya. Cara lain menyajikan informasi adalah dengan menunjukkan sebaran secara lebih merata, bukan hanya miskin dan tidak miskin, namun dengan menampilkan data decile (per sepuluh bagian) dan quintile (per lima bagian) sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1.3.

Tabel 1.3
Perbedaan sosial ekonomi dalam bidang kesehatan (studi kasus Senegal)

Indikator	Persentase penduduk miskin		Garis kemiskinan (Rp)			P1 (%)		P2 (%)				
	Termisk n	Kedua	Tengah Tengah	Kemapat	Terkaya	Rata-Rata Populasi	Rasio Termisk n/Terkaya	Desa	Kota+ desa	Kota	Desa	Kota+desa
NAD	13,69	21,87	19,57	333355	292085	303692	2,78	3,78	3,50	0,84	0,98	0,94
Sumatera Utara	10,75	11,89	11,33	271713	222226	246560	1,84	1,85	1,84	0,53	0,49	0,51
Sumatera Barat	7,42	10,07	9,04	293018	241924	261719	1,25	1,42	1,36	0,35	0,36	0,35
Riau	6,37	9,83	9,47	306504	267007	282479	0,77	1,48	1,21	0,16	0,37	0,29
Jambi	11,19	7,53	8,65	284522	210144	242272	1,31	0,81	0,96	0,26	0,14	0,18
dst												

Sumber: BPS 2012

Indeks kemiskinan di Provinsi Riau dan kabupaten/kota akhir-akhir ini sudah bisa diturunkan, hal ini terlihat dari urutan 24 tahun 1999, menjadi urutan 20 tahun 2002. Keberhasilan penurunan Indeks kemiskinan

di Provinsi Riau tidak terlepas dari semakin membaiknya akses penduduk terhadap air bersih dan fasilitas kesehatan serta adanya perbaikan gizi balita. Keberhasilan menurunkan nilai Indeks kemiskinan di kabupaten/kota merupakan hasil dari peningkatan penyediaan pendidikan dasar, perbaikan akses terhadap air bersih dan perbaikan gizi balita.

Namun yang lebih penting adalah bukan sekedar melihat dari angka-angka yang menjadi indikatornya, tetapi yang lebih penting adalah menurunnya angka kemiskinan tersebut benar-benar bisa dilapangan. Artinya, penduduk memang sudah meningkat taraf kehidupannya dari tahun-tahun sebelumnya. Banyaknya pandangan yang berbeda sekarang ini dalam melihat defenisi tentang kemiskinan itu sendiri, sehingga menyebabkan angka-angka yang dikeluarkanpun terjadi perbedaan.

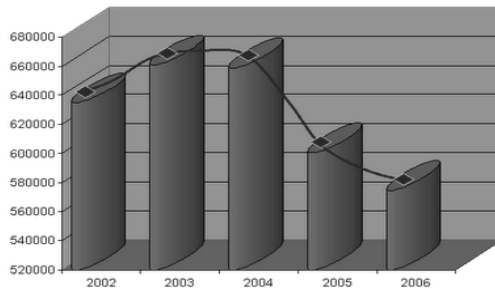
Kemiskinan dari sudut pandang pendapatan tidak selalu sejalan dengan Indeks kemiskinan, karena kedua ukuran tersebut mengukur aspek kemiskinan yang berbeda. Kemiskinan pendapatan yang dinyatakan dalam bentuk proporsi penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan (angka kemiskinan) mengukur deprivasi relatif pada standar kehidupan yang sudah tercapai, sedangkan indeks kemiskinan mengukur deprivasi yang dapat menghambat kesempatan yang dimiliki penduduk untuk mencapai standar kehidupan yang lebih baik.

Meskipun demikian, penggabungan antara kedua ukuran ini akan menghasilkan gambaran menarik tentang kondisi kemiskinan. Data di Kabupaten/Kota

memperlihatkan bahwa daerah dengan indeks kemiskinan rendah cenderung untuk mempunyai angka kemiskinan yang rendah pula, namun daerah dengan nilai indeks kemiskinan tinggi memiliki angka kemiskinan yang lebih bervariasi.

Untuk melihat jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau dari tahun 2002 sampai dengan 2006 dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.

Gambar 1.1
Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Riau tahun 2002-2006



Jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau relatif besar yang tersebar di kantong-kantong kemiskinan pada daerah pesisir, aliran sungai, kepulauan dan daerah pedalaman yang terisolir. Menurut data BPS yang diukur berdasarkan kebutuhan makanan sebesar 2.100 kalori per kapita per hari, pada tahun 2003 persentase penduduk miskin di Provinsi Riau sebanyak 660.700 jiwa atau 14,99 persen.

Angka ini terus mengalami penurunan, dimana tahun 2004 jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau sebanyak 658.600 jiwa atau 14,67 persen, tahun 2005 menjadi

600.400 jiwa atau 12.51 persen dan tahun 2006 menjadi 574.500 jiwa atau 11.20 persen. Dari data diatas terlihat bahwa kecendrungan penduduk miskin di Provinsi Riau dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan, hal ini seiring dengan berbagai program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mengurangi angka kemiskinan tersebut.

Masyarakat yang berada kawasan pesisir menghadapi berbagai permasalahan yang menyebabkan kemiskinan. Pada umumnya mereka menggantungkan hidupnya dari pemanfaatan sumberdaya laut dan pantai yang membutuhkan investasi besar dan sangat bergantung musim. Sebagian besar dari mereka bekerja sebagai nelayan kecil, buruh nelayan, pengolah ikan skala kecil dan pedagang kecil karena memiliki kemampuan investasi terbatas. Nelayan kecil hanya mampu memanfaatkan sumberdaya di daerah pesisir dengan hasil tangkapan yang cenderung terus menurun akibat persaingan dengan kapal besar dan penurunan mutu sumberdaya pantai.

Menurut Kusnadi (Direktorat PMP, 2006), bahwa sebab-sebab pokok yang menimbulkan kemiskinan nelayan adalah: Pertama, belum adanya kebijakan, strategi dan implementasi program pembangunan kawasan pesisir dan masyarakat nelayan yang terpadu diantara para pemangku kepentingan pembangunan. Kedua, adanya inkonsistensi kuantitas produksi (hasil tangkapan), sehingga keberlanjutan aktivitas sosial ekonomi perikanan di desa-desa nelayan terganggu. Ketiga, masalah isolasi geografis desa nelayan, sehingga menyulitkan keluar

masuk arus barang, jasa, capital, dan manusia, yang mengganggu mobilitas ekonomi. Keempat, adanya keterbatasan modal usaha atau modal investasi, sehingga menyulitkan nelayan meningkatkan kegiatan ekonomi perikanannya. Kelima, adanya relasi sosial ekonomi yang “eksploitatif” dengan pemilik perahu, pedagang perantara/tengkulak dalam kehidupan masyarakat nelayan. Keenam, adalah rendahnya tingkat pendapatan rumah tangga nelayan, sehingga berdampak negatif terhadap upaya peningkatan skala usaha dan perbaikan kualitas kehidupan mereka.

Dilihat dari tingkat keberdayaannya, masyarakat pesisir/masyarakat nelayan masih tergolong lapisan sosial “termiskin”. Saefuddin, dkk. (2003) menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaan di lapangan, ketidakefektifan penerapan program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin, pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu modal sosial/partisipasi masyarakat (dukungan moral) yang masih bersifat semu.

Modal sosial merupakan kenyataan yang dimiliki warga, dapat berupa kehendak baik, simpati, persahabatan, hubungan sosial antar individu & keluarga yang dapat membantu mengatasi persoalan warga masyarakat. Dalam konteks demikian, hubungan yang baik antar anggota masyarakat menciptakan jaringan yang bersifat mutualis, dan bahkan mengalahkan individualitas, yang biasanya melingkupi karakteristik budaya barat. Dengan kata lain, jika seseorang mengalami persoalan &

tidak mampu mengatasinya sendiri, warga tersebut dibantu warga lainnya secara sukarela. Dengan hubungan sosial yang erat; pola polarisasi, pengkotak-kotakan, dan pembilahan sosial menjadi luntur (Gunawan, 2005:386).

Modal sosial dalam ekonomi dapat meningkatkan kekuatan pelaku-pelaku yang ada selain itu dapat meningkatkan efisiensi di dalam perekonomian. Modal-modal sosial seperti nilai dan norma, jaringan, kepercayaan, timbal balik, informasi dan kelompok dalam suatu komunitas dapat menjadikan anggota di dalamnya lebih berdaya dalam memperoleh manfaat pemberdayaan. Oleh karena itu, pemanfaatan modal sosial di masyarakat nelayan merupakan alternatif yang sangat krusial dan mendesak dalam rangka menutupi kecen-derungan menurunnya sumberdaya alam tersebut dan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat

Pemberdayaan ekonomi tersebut berasal dari pemerintah maupun non pemerintah, yang meliputi pemberian modal usaha dari pemerintah melalui program pemberdayaan masyarakat. Hasil menunjukkan bahwa Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) secara keseluruhan belum mencapai hasil yang optimal sesuai harapan dan tujuan dari pelaksanaan program. Rata-rata pendapatan sebesar Rp 2.009.901,-/bulan naik sekitar 39.22 % dari sebelumnya. Secara parsial, faktor yang mempengaruhi pendapatan masyarakat adalah jumlah anggota keluarga dan besarnya modal usaha. Manfaat dari program PEMP yang dirasakan secara nyata oleh masyarakat adalah

bantuan pinjaman dana dengan bunga yang sangat rendah.

Kesejahteraan masyarakat pesisir menjadi fokus utama dari UU 27 Tahun 2007. Pengelolaan sumber daya perikanan yang tidak berkelanjutan memiliki keterkaitan dengan penurunan kualitas lingkungan. Oleh sebabnya peneliti menawarkan paradigma pengelolaan yang berkelanjutan dan dapat menyejahterakan masyarakat. Penerapan paradigma tersebut harus didukung oleh kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan melalui pendekatan ekologi, sosial dan ekonomi, penguatan kelembagaan (UU pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil), mitigasi dan adaptasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pemberdayaan masyarakat pesisir, serta kerjasama regional dan internasional seperti pengelolaan sumber daya berbasis ekoregion. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan membutuhkan kebijakan yang komprehensif, terintegrasi dan tepat sasaran juga sesuai dengan pilar pembangunan nasional (pro growth strategy, pro job strategy, dan pro poor strategy). Perubahan paradigma dengan menjadikan laut orientasi sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya wilayah pesisir dan laut.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara terencana dan terstruktur telah dilaksanakan oleh pemerintah (Departemen Kelautan dan Perikanan) melalui program yang langsung menyentuh masyarakat di kawasan pesisir, dimana dalam hubungan ini pemerintah memberdayakan masyarakat pesisir dengan berbagai

aktivitas, seperti bantuan permodalan, bimbingan dan pendampingan serta pemberian keterampilan teknis pada sektor perikanan. Di sisi lain, para nelayan memanfaatkan bantuan dana dan keterampilan ini dalam sektor perikanan tersebut yang merupakan suatu sektor penting karena dengan peningkatan ekspor perikanan, sesuai dengan tujuan pembangunan dalam sektor perikanan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat pesisir dan melepaskan Indonesia dari krisis ekonomi saat ini.

Modal sosial tak dapat dipisahkan dari masyarakat. Sebuah ikatan kuat dari masyarakat di mana warga negara terlibat dalam berbagai kelompok sosial dipandang sebagai lahan subur tumbuhnya modal sosial. Komponen modal sosial terdiri dari kepercayaan ('trust'), aturan-aturan ('norms') dan jaringan-jaringan kerja ('*networks*') yang dapat memperbaiki efisiensi dalam suatu masyarakat melalui fasilitas tindakan-tindakan yang terkordinasi. Modal sosial yang berwujud norma-norma dan jaringan keterkaitan tersebut merupakan prakondisi bagi perkembangan ekonomi, dan prasyarat mutlak bagi terciptanya tata pemerintahan yang baik dan efektif (Kushandajani, 2008:26). Dengan demikian modal sosial merupakan prasyarat bagi keberhasilan pembangunan.

Dalam berbagai organisasi, warga negara akan belajar untuk saling percaya dan menjadi semakin terampil dalam mengatasi masalah melalui tindakan kolektif. Pemberdayaan masyarakat harus memasukkan dimensi modal sosial sebagai salah satu komponennya.

Pemberdayaan masyarakat akan mengalami kegagalan tanpa menyadari pentingnya melibatkan dimensi kultural dan mendayagunakan peran modal sosial yang tumbuh di tengah masyarakat dalam mempercepat dan mengoptimalkan hasil dari proses pemberdayaan itu sendiri. Modal sosial yang berisikan trust, reciprositas, norma sosial dan nilai-nilai etis merupakan pondasi penopang yang akan menentukan perkembangan dan keberlanjutan beragam aktifitas usaha di berbagai sektor kehidupan.

Dalam rangka untuk pembangunan masyarakat pesisir, diperlukan pemberdayaan yang merupakan hasil interaksi antara konsep top-down dan bottomup antara growth strategy dan people centered strategy. Konsep pemberdayaan mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (community based development). Community development adalah suatu proses yang menyangkut usaha masyarakat dengan pihak lain (di luar sistem sosialnya) untuk menjadikan sistem masyarakat sebagai suatu pola dan tatanan kehidupan yang lebih baik, mengembangkan dan meningkatkan kemandirian dan kepedulian masyarakat dalam memahami dan mengatasi masalah dalam kehidupannya, mengembangkan fasilitas dan teknologi sebagai langkah meningkatkan sebagainya.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan melalui pemberdayaan (empowering). Pemerintah memandang dengan potensi wilayah pesisir

yang besar baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia perlu adanya upaya dalam bentuk program yang berkelanjutan dan menyentuh langsung kesasarannya. Salah satu program yang bertujuan dan mendukung kearah tersebut adalah Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). Program ini telah berjalan sejak tahun 2001, dimana tujuan dari program ini adalah penguatan ekonomi dengan modal usaha ekonomi produktif yang berasal dari masyarakat yang berbentuk *social capital* (modal sosial) seperti pendidikan, kesehatan, agama, lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan, permukiman dan infrakstruktur.

2

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Sosial Modal

Istilah “Modal” banyak digunakan dalam analogi bentuk-bentuk modal ekonomi. Dalam pendekatan produksi, sumberdaya utama untuk menentukan tingkat produksi adalah kekayaan alam, modal manusia, modal fisik, modal keuangan, dan modal sosial (DFID 1999; Sakata 2004). Teknologi, kekayaan alam, modal fisik, modal keuangan dan sumberdaya manusia merupakan faktor penting dalam menentukan kapasitas masyarakat untuk menghasilkan suatu produk dalam mendukung kesejahteraan ekonomi. Namun demikian, faktor produksi tersebut belum mampu melihat tingkat interdependensi antar individu dalam masyarakat kalau tidak didukung oleh faktor institusi dan nilai yang berlaku di masyarakat. Determinan kesejahteraan (well-being) hanya terbatas pada faktor fisik (alam, ekonomi, dan

sumberdaya manusia), dan sedikit sekali melihat kesejahteraan dalam konteks modal sosial. Padahal modal sosial merupakan sumberdaya terpenting dalam kehidupan masyarakat karena modal ini merupakan jaringan/hubungan keluarga terhadap dunia luar baik bersifat formal maupun informal untuk memecahkan berbagai persoalan yang ada di masyarakat termasuk masalah peningkatan kesejahteraan keluarga.

Modal sosial berbeda dengan istilah populer lainnya, yaitu modal manusia (human capital). Pada modal manusia segala sesuatunya lebih merujuk ke dimensi individual yaitu daya dan keahlian yang dimiliki oleh seorang individu. pada modal sosial lebih menekankan pada potensi kelompok dan pola-pola hubungan antar individu dalam suatu kelompok dan antar kelompok dengan ruang perhatian pada jaringan sosial, norma, nilai, dan kepercayaan antarsesama yang lahir dari anggota kelompok dan menjadi norma kelompok. Selain itu, modal sosial juga digunakan untuk memahami berbagai masalah sosial yang lain. Konsep modal sosial dapat dipakai untuk memahami berfungsinya pasar, dimana adanya modal sosial menurunkan biaya transaksi. Karena adanya kepercayaan dalam bertransaksi akan menghilangkan atau meminimalkan kontrak-kontrak resmi (Fukuyama, 2000, dan Coleman,2000).

Fukuyama (2000) mendefinisikan modal sosial sebagai norma I yang dapat mendorong kerjasama antar anggota masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, modal sosial akan tampak dari suasana saling percaya antar

warga masyarakat. Fukuyama (2000) berpendapat bahwa ada hubungan erat antara modal sosial dengan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat atau bangsa. Negara atau bangsa-bangsa yang tingkat kesejahteraannya tinggi adalah bangsa-bangsa yang memiliki modal sosial tinggi argumennya, rasa saling percaya antar warga masyarakat dan kemauan untuk bekerjasama menyebabkan “biaya transaksi” dan “biaya kontrol” menjadi rendah, dan hasilnya adalah kehidupan yang lebih efisien dan produktif. Dengan demikian, sumber daya yang ada, dapat dioptimalkan untuk melakukan kegiatan yang membangun nilai tambah bagi kehidupan masyarakatnya. Melalui kegiatan yang membangun nilai tambah inilah maka multiplier effects bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dapat terwujud.

Bourdieu dengan karya tulisannya berjudul *Form of Sosial Capital* (www.google.com – social capital: civic community and education/social_capital) Menjelaskan modal sosial sebagai berikut :

“Sosial capital is 'the aggregate of the actual or potential resources which are linked to possession of a durable network of more or less institutionalized relationships of mutual acquaintance and recognition” (Bourdieu 1983: 249)

Modal sosial adalah sekumpulan sumber daya yang aktual atau potensial yang terhubung dengan kepemilikan sebuah jaringan yang tahan lama dalam hubungan pengenalan dan pengakuan timbal balik yang kurang atau lebih terinstitusionalisasikan atau terlembaga. Dalam pemikiran tekonomi tradisional, istilah “modal” berarti

sejumlah uang yang dapat diinvestasikan dengan harapan akan memperoleh keuntungan di masa depan. (Field, 2003:12).

Sedangkan Putnam dalam artikelnya yang berjudul *Bowling Alone: America's Declining Sosial Capital* dalam Journal of Democracy di situs www.eaglenet.lambuth.edu menjelaskan modal sosial sebagai berikut :

“... physical capital refers to physical objects and human capital refers to the properties of individuals, sosial capital refers to connections among individuals – sosial networks and the norms of reciprocity and trustworthiness that arise from them.....”

“.....A society of many virtuous but isolated individuals is not necessarily rich in sosial capital” (Putnam 2000: 19).

Modal fisik mengacu pada obyek fisik dan modal manusia mengacu pada kekayaan atau perlengkapan individu. Sedangkan modal sosial mengacu pada koneksi atau hubungan antara individu jaringan-jaringan sosial dan normanorma dari hubungan timbal balik dan kepercayaan yang muncul pada masyarakat. Suatu masyarakat meskipun dengan memiliki sifat budi luhur atau baik tetapi merupakan individu yang terisolasi atau mengikat diri tidaklah terlalu banyak dibutuhkan di dalam perkembangan modal sosial.

Modal sosial mengacu kepada hubungan pribadi dan interaksi antarpribadi bersama dengan seperangkat nilai-nilai bersama yang diasosiasikan dengan hubungan dan kontak semacam itu. Lin dkk (2001) menyamakan hubunganhubungan tersebut dengan jaringan sosial “hubungan sosial antara pelaku-pelaku individual, grup

dan organisasi yang berguna sebagai sumber daya untuk menghasilkan pengembalian yang bersifat positif (hal 6).” (*Social Partnership In The Making : Trust, Reciprocity and Sosial Capital at HERO*)

Saling percaya dan kesediaan serta kerelaan dari setiap anggota kelompok untuk saling tolong menolong merupakan modal sosial terpenting dalam suatu kelompok untuk mengembangkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan kesejahteraan bersama.

Meskipun interaksi terjadi karena berbagai alasan, manusia berinteraksi berkomunikasi dan kemudian menjalin kerjasama pada dasarnya dipengaruhi oleh keinginan untuk berbagi cara mencapai tujuan bersama yang tidak jarang berbeda dengan tujuan dirinya sendiri secara pribadi. Keadaan ini terutama terjadi pada interaksi yang berlangsung relatif lama hingga melahirkan modal sosial, yaitu ikatan-ikatan emosional yang menyatukan orang untuk mencapai tujuan bersama, kemudian menumbuhkan kepercayaan dan keamanan yang tercipta dari adanya relasi yang relatif panjang. Modal sosial seperti ini dapat dilihat sebagai sumber yang dapat digunakan baik untuk kegiatan produksi saat ini, maupun untuk diinvestasikan bagi kegiatan di masa depan. (Edi Suharto, 2006)

Lyda Judson Hanifan (1916,1920) memiliki kajian tentang suatu unit sosial yang didalamnya terjadi pola-pola hubungan timbal-balik yang didasari oleh prinsip-prinsip kebajikan bersama (*sosial virtues*), simpati dan

empati serta tingkat kohesifitas hubungan antar individu dalam kelompok (sosial cohesivity).

Modal sosial memiliki peranan yang penting dalam memfungsikan dan menguatkan kehidupan modern (dalam Hasbulah; 2006). Hal tersebut dilihat dari pemahaman dari modal sosial yang diyakini sebagai komponen penting dalam menggerakkan kebersamaan, mobilitas ide, kesaling percaya dan kesaling menguntungkan.

Marnia Nes juga menambahkan bahwa modal sosial merupakan kemampuan masyarakat untuk bekerjasama demi mencapai tujuan bersama di dalam berbagai kelompok dan organisasi. Tujuan bersama ini terkait dengan kemakmuran, kesejahteraan, kesuksesan dan lain-lain. Beberapa hal tersebut akan mudah dicapai oleh suatu masyarakat apabila satu sama lain memiliki kepercayaan yang kuat. Kemampuan bekerjasama muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau di bagian-bagian paling kecil dalam masyarakat. Modal sosial bisa dilembagakan (menjadi kebiasaan) dalam kelompok yang paling kecil ataupun dalam kelompok masyarakat yang besar seperti negara.

Pilar modal sosial, menurut Paldam (2000), adalah kepercayaan (trust), eksistensi jaringan (network), dan kemudahan bekerja sama (ease of cooperation). Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa modal sosial adalah kerja sama antarwarga atau antar individu untuk menghasilkan tindakan kolektif.

Masyarakat yang memiliki modal sosial tinggi cenderung bekerja secara gotong-royong, merasa aman untuk berbicara dan mampu mengatasi perbedaan-perbedaan. Sebaliknya, pada masyarakat yang memiliki modal sosial rendah akan tampak adanya kecurigaan satu sama lain, merebaknya 'kelompok kita' dan 'kelompok mereka', tiadanya kepastian hukum dan keteraturan sosial, serta seringkali muncul 'kambing hitam'.

Modal sosial memiliki banyak unsur yang mendukung dan membentuknya. Rusdi Syahra menjelaskan modal sosial memiliki sepuluh unsur sebagai berikut :

1. Kepercayaan (*trust*) adalah kecenderungan untuk menepati sesuatu yang telah dikatakan baik secara lisan ataupun tulisan. Hubungan yang familiar dan stabil di kalangan pelaku-pelaku sosial dalam organisasi dapat mengurangi keraguan para partisipan struktur sosial mengenai motivasi orang lain dan meredakan kegelisahan akan tindakantindakan orang lain yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Agar orang-orang dengan kepentingan berbeda dapat bekerjasama untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah mereka tetapkan, mereka tidak hanya perlu mengetahui satu sama lain tetapi juga mempercayai satu sama lain untuk mencegah adanya eksploitasi maupun kecurangan dalam hubungan mereka. (Coleman, (1998):102-104).
2. Solidaritas, kesediaan untuk secara sukarela ikut menanggung suatu konsekuensi sebagai wujud adanya rasa kebersamaan dalam menghadapi suatu masalah.

3. Toleransi, kesediaan untuk memberikan konsensi atau kelonggaran baik dalam bentuk materi maupun non materi sepanjang tidak berkenan dengan hal-hal yang bersifat prinsipil.
4. Tanggung jawab adalah kesadaran untuk memenuhi kewajiban sebagai cerminan rasa peduli terhadap masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama.
5. Kerjasama adalah suatu keadaan yang mencerminkan kesediaan dari semua pihak yang terlibat memberikan kontribusi yang seimbang dalam melakukan berbagai hal yang menyangkut kepentingan bersama. Kerjasama juga merupakan upaya penyesuaian dan koordinasi tingkah laku yang diperlukan untuk mengatasi konflik ketika tingkah laku seseorang atau kelompok dianggap menjadi hambatan oleh kelompok lain, sehingga akhirnya tingkah laku mereka bisa cocok satu sama lain.
6. Kebersamaan adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan adanya kesediaan untuk terlibat dalam kegiatan yang menyangkut kepentingan bersama.
7. Kemandirian adalah sikap dan perilaku yang mengutamakan kemampuan sendiri untuk memenuhi berbagai kebutuhan tanpa tergantung kepada atau mengharap bantuan orang lain.
8. Keterbukaan adalah kesediaan menyampaikan secara apa adanya segala hal yang orang lain yang berkepentingan menganggap bahwa mereka perlu mengetahuinya.

9. Keterusterangan adalah kesediaan untuk menyampaikan secara apa yang sesungguhnya yang dipikirkan atau dirasakan tanpa dihalangi oleh perasaan ewuh, pekewuh, sungkan atau takut.
10. Empati adalah kemampuan memahami apa yang dirasakan oleh orang lain atau kemampuan untuk menempatkan diri dalam situasi orang lain.

B. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan dilahirkan dari bahasa Inggris, yakni *empowerment*, yang mempunyai makna dasar ‘pemberdayaan’, di mana ‘daya’ bermakna kekuatan (*power*). Bryant & white (1997) menyatakan pemberdayaan sebagai upaya menumbuhkan kekuasaan dan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat miskin. Cara dengan menciptakan mekanisme dari dalam (*build-in*) untuk meluruskan keputusan-keputusan alokasi yang adil, yakni dengan menjadikan rakyat mempunyai pengaruh. Sementara Freire (Sutrisno, 1999) menyatakan *empowerment* bukan sekedar memberikan kesempatan rakyat menggunakan sumber daya dan biaya pembangunan saja, tetapi juga upaya untuk mendorong mencari cara menciptakan kebebasan dari struktur yang opresif.

Usman (1995) menjelaskan bahwa pemberdayaan (*empowerment*) dapat didefinisikan sebagai “upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat”. Dalam konteks ini, secara implisit pemberdayaan mengandung unsur “partisipasi” yang seharusnya dimunculkan dari dalam diri masyarakat itu

sendiri. Sedangkan dalam hal ini Pearse dan Stiefel (1979) membedakan istilah “pemberdayaan partisipatif” yang mengandung bentuk-bentuk seperti: menghormati kekhasan lokal, dekonsentrasi kekuasaan, dan peningkatan kemandirian.

Pemberdayaan masyarakat lokal adalah proses yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif anggota masyarakat itu sendiri. Anggota masyarakat dipandang bukan sebagai sistem klien yang bermasalah melainkan sebagai masyarakat yang unik dari memiliki potensi, hanya saja potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan. Pengembangan masyarakat lokal pada dasarnya merupakan proses interaksi antara anggota masyarakat setempat yang difasilitasi oleh pekerja sosial. Pekerja sosial membantu meningkatkan kesadaran dan mengembangkan kemampuan mereka dalam mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan (Suharto 2005).

Shardlow (1998) menyatakan bahwa pemberdayaan akan dikatakan berhasil jika masyarakat atau kelompok mengalami keadaan yang berdaya atau mengalami keberdayaan, sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk menopang kebutuhannya sendiri. Individu, atau komunitas yang mampu mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan kesejahteraan hidupnya, maka inilah yang disebut keberdayaan. Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai tujuan. Sedangkan

memberdayakan masyarakat adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan, keterbelakangan, ketidakmampuan, dan musibah yang melanda. (Ratna Devi, 2006)

Pemberdayaan dalam Bahasa Inggris adalah *empowerment*. Kata *power* dalam *empowerment* diartikan "daya" sehingga *empowerment* diartikan sebagai pemberdayaan atau memberikan daya. Daya dalam arti kekuatan yang berasal dari dalam, tetapi dapat diperkuat dengan unsur-unsur penguatan yang diserap dari luar. Pemberdayaan pada dasarnya memberikan kekuatan kepada pihak yang kurang atau tidak berdaya (*powerless*) agar dapat memiliki kekuatan yang menjadi modal dasar pengembangan diri. Pemberdayaan yang dimaksud tidak hanya mengarah pada individu semata, tapi juga kolektif (Harry Hikmat, 2001: 46-48).

Menurut Payne, tujuan utama pemberdayaan adalah membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan, yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan.

Dijelaskan pula konsep pemberdayaan menurut Parkins, Douglas, Zimerman dan Marc, di dalam *American Journal of Community Pshicology* di situs www.people.vanderbilt.edu/~douglas.d.perkins/empintro_proquest.pdf yaitu : "Empowerment is construct that links individual strengths and competencies, natural helping systems, and proactive behaviors

to sosial policy and sosial change (rappaport, 1981, 1984). Empowerment oriented interventions enhance wellness while they also aim to ameliorate problems, provide opportunities for participants to develop knowledge and skills, and engage professionals as collaborators instead of authoritative experts...".(Parkins, Douglas. D; Zimmerman and Marc A 1995; 23, 5; pg. 595).

Pemberdayaan membangun hubungan kekuatan dan kemampuan individu dengan sistem bantuan yang alami, dan perilaku proaktif menuju kebijakan sosial dan perubahan sosial. Pemberdayaan berorientasi pada intervensi peningkatan yang baik, selama mereka juga memiliki tujuan untuk memperbaiki masalah, menyediakan kesempatan untuk anggotanya atau individu untuk mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan, serta melibatkan para professional yang berkolaborasi atau bekerjasama sebagai pengganti tenaga ahli. Pemberdayaan tak lepas dari peran serta pihak luar kelompok sebagai pendukung dan fasilitator dalam memperoleh kekuatan atau keberdayaan kembali.

Menurut Tjandraningsih (1996:3), pemberdayaan mengutamakan usaha sendiri dari orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya. Oleh karena itu pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Pemberdayaan menurut Drajat Trikartono (2000) adalah membuat menjadi punya *power* atau daya untuk melakukan sesuatu. Margono Slamet (dalam Totok Mardikanto,

2001) menegaskan bahwa. memberdayakan berarti memberi daya kepada yang tidak berdaya dan atau mengembangkan daya yang sudah dimiliki menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Kartasmita (1995) dalam (Vidhyandika Moeljarto, 1996) “Pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya”. Oleh karena dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan memiliki unsur-unsur, yaitu adanya upaya memberi daya/kekuatan dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran (Ratna Devi, 2006).

Pemberdayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah upaya membuat sesuatu berkemampuan atau berkekuatan. Ada beberapa upaya dalam pemberdayaan yang terkait dengan penelitian ini, antara lain :

1. Pemberdayaan dilakukan untuk memperkuat potensi ekonomi atau daya yang dimiliki masyarakat. Dalam rangka memperkuat potensi ini, upaya yang perlu dilakukan adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, dan akses terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar.
2. Pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi kelompok berarti berupaya melindungi untuk

mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang sudah maju dengan yang belum berkembang (Warta Demografi, 1997).

Selanjutnya harus menggunakan pendekatan kelompok dan partisipasi kelompok karena secara sendiri-sendiri warga masyarakat yang kurang berdaya sulit untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Organisasi adalah salah satu sumber *power* yang penting, maka untuk *empowerment*, pengorganisasian masyarakat ini menjadi penting sekali.

Menurut Girvan (2006), pemberdayaan dilihat dari tujuan yang ingin didapatkan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat miskin atau lemah yang menjadi berdaya, memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai atau membangkitkan atau mempertahankan mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan kelompok (pelatihan, kursus, pertemuan rutin, dan lain-lain), dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Tri Widodo W. Utomo (2003) dalam "Beberapa Permasalahan dan Upaya Akselerasi Program Pemberdayaan" menjabarkan kategorisasi pemberdayaan menjadi 5 (lima) kelompok besar pemberdayaan. Penelitian ini mengacu pada 3 kategori pemberdayaan, yakni:

1. Penyediaan akses yang lebih terbuka, luas dan lebar terhadap sumberdaya seperti modal, informasi, kesempatan berusaha dan memperoleh kemudahan / fasilitas. Aktifitas didalamnya antara lain; pemberian pinjaman lunak, penerbitan dan penyebaran bulletin/pamflet, subsidi bagi pengusaha lemah dan sebagainya.
2. Pengembangan potensi masyarakat baik dalam pengertian SDM maupun kelembagaan masyarakat. Setiap upaya untuk merubah kondisi dari bodoh menjadi pintar, dari tidak mampu menjadi mampu, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tuna keterampilan menjadi terampil, dan sebagainya, jelas sekali merupakan program pemberdayaan. Aktivitas semacam pelatihan, penyuluhan dan kursus-kursus yang diselenggarakan secara sistematis dengan tujuan memperkuat potensi masyarakat, adalah contoh nyata dari aksi pemberdayaan.
3. Penyertaan masyarakat atau kelompok masyarakat dalam proses perumusan perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan atau kelompok. Seiring dengan paradigma pembangunan yang bertumpu dan berorientasi pada rakyat (*people-based and people-oriented development*), rakyat harus diakui dan ditempatkan sebagai elemen kunci dalam perumusan perencanaan dan implementasi kebijakan-kebijakan pembangunan atau kelompok.

Kategori pemberdayaan yang lain adalah :

1. Peningkatan keseimbangan antara sebuah kondisi yang memiliki keunggulan dengan kondisi lain yang tidak memiliki keunggulan.
2. Penyediaan stimulus untuk membangkitkan swadaya dan swakelola dalam bidang pelayanan umum atau infrastruktur umum. Hal ini terkait dengan pembangunan, khususnya di perkotaan.

C. Modal sosial dan Pemberdayaan Dalam pendekatan pembangunan *Bottom-up* (Level Mikro)

Perencanaan dan implemmentasi pembangunan dengan sistem “*bottom-up*” artinya adalah perencanaan yang dilakukan dimana masyarakat lebih berperan dalam hal pemberian gagasan awal sampai dengan mengevaluasi program yang telah dilaksanakan sedangkan pemerintah-pemerintah hanya sebagai fasilitator dalam suatu jaiannya program. Pendekatan *bottom-up* yaitu pendekatan pembangunan berbasis komunitas merupakan strategi yang dipercaya dalam mempromosikan model yang lebih partisipatif dalam pembangunan integritas dan sinergi yang tinggi menghasilkan kesempatan-kesempatan sosial (*social opportunity*) yang menunjukkan kepercayaan tinggi keluarga maupun umum, dengan kepentingan umum lebih diutamakan dalam semua kegiatan sosial dan ekonomi. Pencapaian kuadran ini menunjukkan keberhasilan pembangunan sistem “*bottom-up*” yang dicirikan oleh adanya integrasi dan hubungan baik

berbagai sumberdaya dalam masyarakat dalam mendukung kesejahteraan bersama (Putnam, 2003).

D. Modal Sosial dan Pemberdayaan dalam Pendekatan Pembangunan *Top-down* (Level Makro)

Perencanaan pembangunan dengan sistem “*top-down*” artinya adalah perencanaan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan sebagai pemberi gagasan awal serta pemerintah berperan lebih dominan dalam mengatur jalannya program yang berawal dari perencanaan hingga proses evaluasi, dimana peran masyarakat tidak begitu berpengaruh. Kelebihan dari model “*top-down*” adalah: (1) Masyarakat tidak perlu bekerja serta memberi masukan program tersebut sudah dapat berjalan sendiri karena adanya peran pemerintah yang optimal, (2) Hasil yang dikeluarkan bisa optimal dikarenakan biaya yang/dikeluarkan ditanggung oleh Pemerintah, (3) Mengoptimalkan kinerja para pekerja di pemerintahan dalam menyelenggarakan suatu program.

E. Modal Sosial dan Pemberdayaan Dalam Model Gabungan *Bottom-up* dan *Top-down* Pembangunan

Pada model gabungan, pemberdayaan merupakan hasil interaksi antara konsep *top-down* dan *bottom-up*, antara *growth strategy* dan *people centered strategy*. Konsep pemberdayaan mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*Community Development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*Community Based*

Development). Pembangunan dengan sistem gabungan dari kedua sistem diatas (*Bottom-up* dan *Top-down*) adalah perencanaan yang disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan program yang diinginkan oleh masyarakat yang merupakan kesepakatan bersama antara pemerintah dan juga masyarakat sehingga peran antar satu dan keduanya saling berkaitan. Bila dilihat dari kekurangan serta kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing sistem tersebut maka sistem yang dianggap paling baik adalah suatu sistem gabungan dari kedua jenis sistem tersebut karena banyak sekali kelebihan yang terdapat didalamnya antara lain adalah selain masyarakat mampu berkreasi dalam mengembangkan ide-ide mereka sehingga mampu berjalan beriringan bersama dengan pemerintah sesuai dengan tujuan utama yang diinginkan dalam mencapai kesuksesan dalam menjalankan suatu program tersebut.

F. Konsep Kesejahteraan Masyarakat

Secara umum, kesejahteraan merupakan kondisi telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia sesuai dengan standar kualitas hidup manusia. Kesejahteraan dibagi menjadi dua yaitu kesejahteraan lahir dan kesejahteraan batin. Kesejahteraan lahir biasanya diukur secara ekonomi misalnya tercukupinya kebutuhan lahir manusia seperti kebutuhan akan makanan, kebutuhan akan pakaian, perumahan, dan lainnya. Kesejahteraan ini biasanya diinterpretasikan dari pendapatan. Sedangkan kesejahteraan batin diukur secara batiniah yaitu ketentraman, kedamaian, hubungan kekeluargaan, dan lain-lain.

Kesejahteraan batin ini diinterpretasikan dari relasi sosial atau kemanusiaan yang dapat menciptakan suasana damai dalam keberagaman sosial (Qomariah, 2009).

Dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir ada beberapa indikator yang digunakan seperti indikator Perubahan Pendapatan Nelayan dan indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN). Ditjen Pesisir dan pulau-pulau Kecil (P3K) (2007), mengembangkan konsep dalam penyusunan indikator kesejahteraan masyarakat pesisir adalah dengan menggunakan Konsep Pemetaan Kemiskinan (Poverty Mapping).

3

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji pengaruh pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan modal sosial sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
2. Menentukan pola penguatan ekonomi melalui modal sosial dan pemberdayaan ekonomi yang dapat diterapkan bagi masyarakat pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
3. Mentransformasi ide dalam komunitas tersebut dalam program pengembangan masyarakat melalui modal sosial dan penguatan kelembagaan yang sudah ada sehingga tidak tergantung pada hasil laut.

4. Dengan adanya modal sosial akan memperkecil biaya transaksi dan biaya kendali untuk suatu kegiatan pengembangan masyarakat pesisir.

B. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi:

1. Bidang kajian ilmiah, yaitu memberikan kontribusi pemikiran bagi penelitian ilmiah yang akan dilakukan di masa depan dan memperkaya wawasan dalam pengembangan ilmu, khususnya mengenai pengaruh pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan modal sosial terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
2. Memberikan informasi kepada masyarakat pesisir itu sendiri mengenai pentingnya pembangunan modal sosial yang lebih baik, sehingga upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih optimal.
3. Memberikan informasi kepada pemerintah, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa modal sosial memiliki peran yang sangat strategis bagi pemberdayaan masyarakat pesisir dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.
4. Bagi para peneliti-peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pemberdayaan masyarakat dan modal sosial serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir.

4

METODE DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif (*positivism*) dan juga menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendukung hasil yang diperoleh dari pendekatan kuantitatif. Penggunaan dua pendekatan dalam penelitian ini secara sinergis diharapkan mampu menjelaskan dan membahas hasil penelitian secara komprehensif serta memberikan pemahaman yang lebih baik bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penelitian ini.

B. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat pesisir pantai di Provinsi Riau, sedangkan

sampelnya adalah masyarakat pesisir pantai Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Meranti.

C. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional dan masing-masing variabel penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP) merupakan segenap upaya yang dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek ekonomi. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya kegiatan yang digulirkan dalam program PEMP adalah modal usaha, kedai pesisir, LKM (LEPP-M3), dan SPDN.
 - a. Modal Usaha adalah dana pengembangan usaha yang disediakan oleh pemerintah melalui program PEMP yang diperuntukan bagi nelayan dan masyarakat pesisir lainnya.
 - b. Kedai Pesisir adalah warung atau usaha yang didirikan oleh masyarakat atau badan usaha/koperasi guna menyediakan kebutuhan sembilan bahan pokok atau kebutuhan lainnya bagi anggota kelompok dan masyarakat pesisir lainnya dalam menunjang usaha/operasi penangkapan ikan atau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
 - c. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) LEPP-M3 adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat pesisir guna mengelola dana yang disiapkan oleh pemerintah dan dana hasil perguliran dari anggota kelompok peminjam.

- d. *Solar Packed Dealer* untuk Nelayan (SPDN) adalah usaha yang didirikan oleh koperasi atau badan usaha lainnya untuk mensuplai kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) kepada nelayan dengan harga subsidi.
2. Modal sosial adalah aturan, kewajiban, hubungan timbal balik dan kepercayaan yang tertanam (*embedded*) di dalam hubungan sosial, struktur sosial dan pengaturan institusional dari masyarakat yang memungkinkan para anggotanya untuk mencapai tujuan individu dan tujuan komunitas. Adapun indikator-indikator, modal sosial dalam pengertian ini ada 5 (lima), yaitu: timbal balik (*reciprocity*), norma (*norms*), jaringan (*network*), kepercayaan (*trust*), dan kelompok (*group*).
 - a. Timbal-balik (*reciprocity*), adalah kecenderungan saling tukar kebaikan antar individu dalam suatu kelompok yang dalam hal ini kelompok masyarakat pesisir.
 - b. Norma adalah sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas sosial tertentu. Aturan-aturan kolektif tersebut bisa tertulis namun bisa tidak tertulis tetapi dipahami oleh setiap anggota komunitas serta menentukan pola tingkah laku yang diharapkan dalam konteks hubungan sosial. Norma dalam penelitian ini adalah turun yang berlaku dalam kelompok masyarakat pesisir, yang berkaitan dengan pengelolaan modal usaha, kedai pesisir,

lembaga keuangan mikro dan *Solar Packed Dealer* nelayan.

- c. Jaringan adalah hubungan-hubungan yang tersusun akibat interaksi sosial dengan individu baik didalam maupun diluar komunitas. Jaringan pada penelitian ini adalah jaringan antara komunitas masyarakat pesisir dan jaringan diluar kelompok masyarakat pesisir.
 - d. Kepercayaan adalah kejujuran yang dimiliki oleh seseorang sehingga layak untuk dipercaya, berperilaku konsisten, bertanggung jawab, saling menghargai/menghormati dan tulus.
 - e. Kelompok adalah mengukur tingkat partisipasi anggota dalam kelompok. Indikator kelompok adalah dalam penelitian ini jumlah anggota kelompok partisipasi dalam pertemuan dan pengambilan keputusan, sumber pendanaan kelompok dan ikut serta dalam pengumpulan dana kelompok.
3. Kesejahteraan yaitu suatu kondisi seseorang atau masyarakat yang kecukupan sandang, pangan terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Indikator kesejahteraan dalam penelitian ini adalah pendapatan keluarga, pendidikan keluarga, kesehatan keluarga, kondisi rumah, dan fasilitas penunjang usaha.

- a. Pendapatan keluarga adalah penghasilan keluarga dari usaha utama, tambahan dan usaha lainnya dalam 1 bulan.
- b. Pendidikan keluarga adalah kemudahan bagi masyarakat pesisir mendapatkan pendidikan baik melalui jalur formal maupun non formal.
- c. Kesehatan keluarga adalah kemudahan bagi masyarakat pesisir mendapatkan pelayanan kesehatan.
- d. Kondisi rumah adalah kondisi fisik rumah dan fasilitas lainnya yang dimiliki nelayan dalam kehidupan sehari-hari.
- e. Fasilitas penunjang adalah kegiatan usaha dan rumah tangga adalah kepemilikan aset penunjang usaha kelompok masyarakat nelayan yang digunakan untuk keperluan rumah tangga.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan yang diuraikan pada bab ini berkaitan dengan hasil analisis yang telah dilakukan. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari empat hipotesis yang diajukan seluruh hipotesis tersebut diterima.

1. Pengaruh Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir terhadap Modal Sosial

Modal sosial merupakan aset yang paling berharga yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat tertentu dalam suatu wilayah, termasuk masyarakat pesisir yang berdiam di daratan Meranti dan Rokan Hilir. Sumberdaya manusia

terbentuk melalui potensi kelompok dengan melakukan hubungannya baik berdasarkan pada jaringan sosial, norma, nilai dan kepercayaan menjadikan sebuah masyarakat memiliki potensi untuk maju dan berkembang. Hal ini sesuai dengan definisi modal sosial menurut Inayah (2012:44) yaitu sumberdaya yang muncul dari hasil interaksi dalam suatu komunitas, baik antar individu maupun institusi yang melahirkan ikatan emosional berupa kepercayaan, hubungan-hubungan timbale balik, dan jaringan-jaringan sosial, nilai-nilai dan norma-norma yang membentuk struktur masyarakat yang berguna untuk kordinasi dan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Modal sosial dalam ekonomi dapat meningkatkan kekuatan pelaku-pelaku yang ada selain itu dapat meningkatkan efisiensi di dalam perekonomian. Modal – modal sosial seperti nilai dan norma, jaringan, kepercayaan, timbal balik, informasi dan kelompok dalam suatu komunitas dapat menjadikan anggota di dalamnya lebih berdaya dalam memperoleh manfaat pemberdayaan.

Namun demikian, tentu saja hal tersebut akan terwujud dengan adanya unsur-unsur motivasi yang dapat mengarahkan mereka pada penerapan kerja kelompok yang lebih baik dan konkrit. Salah satu diantaranya adalah hadirnya program-program pemberdayaan masyarakat yang biasanya dikurcurkan oleh pemerintah. Harapannya adalah melalui pemberdayaan masyarakat maka modal sosial akan terpakai. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Gold et al dalam Mattana (2006) bahwa

secara etimologis modal sosial memiliki pengertian modal yang dimiliki masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat

Sebagaimana Freire (1992) yang lebih jauh menjelaskan bahwa proses pemberdayaan merupakan metode yang berusaha mengubah persepsi termasuk mengubah motivasi atau dorongan seseorang dalam lingkungan masyarakat, sehingga memungkinkan individu beradaptasi dengan lingkungannya, menumbuhkan kesadaran dan motivasi atau dorongan dalam diri seseorang sebenarnya diperlukan intervensi atau “stimulasi” yang berasal dari luar, seperti rangsangan atau “stimulasi” dana bantuan dari pemerintah, lingkungan yang terkait dengannya dan lain-lain. Hal ini karena motivasi seseorang dapat berkembang tidak lepas dari “kemampuan” seseorang yang ditentukan oleh berbagai macam faktor termasuk budaya yang melekat pada masyarakat tersebut. Budaya secara implisit masuk dalam karakter suatu masyarakat dan dapat berpengaruh pada sifat dan cara bekerja dari masyarakat itu sendiri, sehingga pada gilirannya akan membentuk sebuah modal baik secara fisik maupun nonfisik, kognitif atau afektif yang jika diakumulasi akan mewujudkan suatu modal dalam konteks sosial.

Berdasarkan hasil analisis data, didapatkan bahwa modal sosial yang tumbuh di dalam kehidupan masyarakat pesisir ternyata dipengaruhi oleh program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan pemerintah setempat bagi masyarakat tersebut. Artinya, modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat menjadi semakin baik dengan hadirnya

program pemberdayaan yang disebut dengan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang dikurcurkan oleh pemerintah pada hampir seluruh wilayah kabupaten/kota di Kabupaten Meranti dan Rokan Hilir.

Item-item program PEMP yang banyak berperan terhadap pembentukan modal sosial menjadi lebih baik tersebut secara berurutan dimulai dari:

- a. Kemudahan di dalam mengakses kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) yang disebut usaha Solar Packed Dealer untuk Nelayan (SPDN). Usaha ini didirikan oleh koperasi atau badan usaha untuk menyuplai BBM item nelayan dengan harga subsidi. Adanya SPDN sebagai penyedia BBM yang dibutuhkan nelayan semakin memunculkan semangat kerja dalam kelompok. Para nelayan tidak lagi kesulitan memperoleh BBM untuk melaut, sehingga semua pekerjaan yang seharusnya dilakukan secara bersama-sama dapat dilakukan dengan mudah. Misalnya, melaut dengan waktu yang bersamaan memudahkan saling membantu, mulai dari menyediakan keperluan, bahan-bahan, proses penangkapan ikan, sampai pada mobilisasi hasil tangkapan dari laut ke darat. Kesemua hal tersebut mustahil dilakukan jika BBM yang dibutuhkan tidak tersedia atau sulit didapatkan.

Kesulitan seperti kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM mengakibatkan nelayan tradisional semakin terpuruk. Kenaikan harga solar ini juga dibarengi dengan naiknya harga suku cadang mesin. Untuk mengatasi masalah tersebut seringkali nelayan

harus mencampur solar dengan minyak tanah. Langkah ini sebenarnya berisiko pada rusaknya mesin. Namun untuk jangka pendek, strategi ini masih dianggap menguntungkan oleh nelayan.

Sebelum adanya SPDN dari program PEMP ini masyarakat memang banyak merasakan dan mengalami kesulitan dalam melaksanakan aktivitas ekonominya sehari-hari. Hal ini sesuai dengan penuturan salah seorang nelayan responden Baharuddin (Ketua Kelompok Nelayan, 40Tahun) sebagai berikut:

“SPDN disini masih terbilang jauh dari pangkalan operasi nelayan, harus pake motor dulu 20 menit. Inginnya ada SPDN dibangun didekat sini, jadi memudahkan nelayan membawa solarnya ke tempat nelayan”

Sasaran dari program PEMP adalah masyarakat pesisir, yang tergolong skala mikro dan kecil, yang berusaha sebagai nelayan, pembudidaya ikan, pedagang hasil perikanan, pengolah ikan, pengusaha jasa perikanan, dan pengelola pariwisata bahari serta usaha/kegiatan lainnya yang terkait derigan kelautan dan perikanan seperti pengadaan bahan dan alat perikanan serta BBM (Solar Pocked Dealer untuk nelayan atau kios BBM)

Bukti nyata dari perwujudan pemerintah dalam memudahkan nelayan mengakses kebutuhan bahan bakar minyak ditunjukkan dengan gambar berikut:



Gambar 5.7 Salah satu SPDN di Pesisir Kab. Rokan Hilir

Sumber: Dokumentasi Penelitian, Tahun 2015

- b. Modal usaha, yaitu dana yang disediakan oleh pemerintah untuk pengembangan usaha masyarakat pesisir yang dalam hal ini nelayan. sebagaimana SPDN, melalui modal usaha motivasi kerja para nelayan senlakin meningkat terutama dalam hal hubungan kerja antar nelayan. Sikap saling bantu membantu yang memang sudah menjadi karakter budaya orang Indonesia pada umumnya, masyarakat pesisir Meranti dan Rokan Hilir secara khusus memiliki sikap tersebut Berbicara mengenai modal, di dalam bisnis dikenal 2 pengertian modal. Pertama, modal yang dimiliki sendiri, dalam artian pelaku bisnis tersebut menysihkan sejumlah uang yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan usahanya. Kedua, modal dari luar milik sendiri yatu modal yang diperoleh dari lembaga perbankan atau non perbankan. Untuk modal yang diperoleh dari sumber non perbankan, sumbernya

cukup banyak untuk mendapatkannya, bisa dari lembaga keuangan non bank (seperti koperasi dan LEPP-M3), individu-individu, sanak kerabat dan banyak lagi sumber keuangan informal lainnya. Pengelolaan dan mekanisme imbal-baliknya berbeda-beda tergantung dari kesepakatan antar pihak.

Peran pemerintah dalam pembangunan masyarakat untuk kesejahteraan dan kemakmuran memang tidak lepas dari peran serta masyarakat itu sendiri. Sehingga ketika masyarakat lebih diperhatikan dan diberdayakan maka akan menmbangkitkan potensi-potensi yang tersimpan dan akan mengerahkan seluruh potensi tersebut sebab merasa dipercaya atau rnerasa dianggap mampu untuk berperan serta dalam pembangunan, apalagi jika obyek dan sasaran pembangunan adalah masyarakat yang bersangkutan di wilayahnya sendiri.

Modal Usaha seperti media berlayar dan alat tangkap yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat pesisir masih kurang layak karena mereka hanya menggunakan pompong atau perahu kecil (sampan) untuk mencari ikan dengan bantuan jala yang sudah berlubang dan banyak jahitan. Kondisi modal usaha tersebut digambarkan sebagai berikut:



Gambar 5.8. Modal Usaha di Kabupaten Meranti

Sumber: Dokumentasi Penelitian, Tahun 2015



Gambar 5.9. Modal Usaha di Kabupaten Rokan Hilir

Sumber: Dokumentasi Penelitian, Tahun 2015

- c. Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat pesisir untuk mengelola dana dari program PEMP, Program PEMP memfasilitasi akses masyarakat terhadap sumber permodalan, memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir, meningkatkan kemampuan masyarakat pesisir dalam rangka pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut secara optimal dan berkelanjutan sesuai dengan kaidah kelestarian lingkungan serta pengembangan kemitraan masyarakat pesisir dengan lembaga swasta dan pemerintah. Dalam

proses pelaksanaannya dibentuk beberapa organisasi sebagai wadah untuk pengembangannya, seperti didirikannya Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir “Mikro Mitra Mina” (LEPP-M3) sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) kemitraan koperasi untuk wilayah pesisir yang dibentuk oleh masyarakat lokal sendiri dan Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) sebagai objek dari program PEMP tersebut. Salah satu kendala utama bagi masyarakat nelayan adalah kurangnya modal kerja. Masalah keuangan tersebut kemudian menggerogoti struktur nilai di dalam masyarakat sehingga menyebabkan pergeseran nilai-nilai potensi sosial masyarakat yang tidak lain adalah terdegradasinya modal sosial yang ditandai dengan menurunnya motivasi kerja secara individual yang pada akhirnya berpengaruh pada kehidupan masyarakat secara komuna:. Oleh karena itu, dengan hadirnya LKM dari program PEMP tersebut dapat dikatakan sebagai obat penyembuh dari keruntuhan modal sosial yang terjadi.

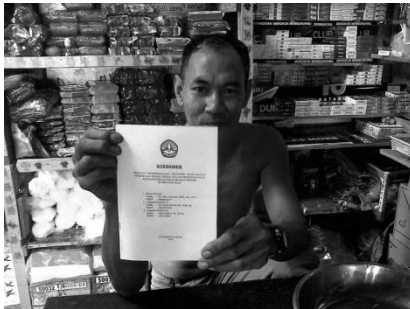
- d. Yang terakhir, kedai Pesisir yaitu warung atau usaha yang didirikan untuk kebutuhan sembilan bahan pokok (Sembako) atau kebutuhan lainnya sebagai penunjang usaha/ operasi penangkapan ikan disamping untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kegiatan Pengembangan Kedai Pesisir ini yang mempunyai tujuan meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat pesisir dengan ketersediaan berbagai kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau ini

difokuskan pada masyarakat pesisir. Manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan pengembangan kedai pesisir ini, terkait pula dengan upaya mengatasi kemiskinan ekonomi masyarakat pesisir serta perbaikan taraf hidup dan akses ekonomi yang lebih baik. Sehingga kegiatan penyediaan prasarana ekonomi dalam bentuk pengembangan kedai pesisir (*the coastal minishop*) ini diharapkan dapat menumbuhkan kegiatan ekonomi masyarakat pesisir. LKM LEPP-M3 dan Kedai Pesisir diatas, peranannya di dalam meningkatkan modal sosial nampak relatif dibandingkan dengan peran SPDN dan Modal Usaha seperti dikemukakan pada poin 1 dan 2 di atas. Hal ini mungkin disebabkan rendahnya tingkat SDM masyarakat pesisir yang ditunjuk atau diamanahkan untuk mengelola LKM dan Kedai Pesisir, sebab kedua jenis usaha tersebut memang sangat membutuhkan penanangan dan pengelolaan yang baik dan benar. Beberapa masyarakat pesisir yang mempunyai kemampuan keuangan memilih mendirikan Kedai dan Warung Pesisir yang membantu para nelayan dan keluarganya. Beberapa diantara mereka sering memberi keringanan pada nelayan untuk membayar hutangnya setelah mendapat uang dari hasil tangkapan. Berikut ini adalah contoh Kedai Pesisir yang ada di dua kabupaten:



Gambar 5.10 Kondisi Kedai Pesisir di Kabupaten Rokan Hilir

Sumber: Dokumentasi Penelitian, Tahun 2015



Gambar 5.11. Kondisi Kedai Pesisir di Kabupaten Meranti

Sumber: Dokumentasi Penelitian, Tahun 2015

Walaupun demikian, dari uraian-uraian diatas menggambarkan bahwa secara keseluruhan hadirnya keempat usaha dari program PEMP di tengah-tengah masyarakat pesisir (nelayan) telah memberikan motivasi kerja bagi usaha mereka, yaitu semakin meningkatkan semangat di dalam bekerja sehingga disini nampak indikasi bahwa telah terjadi peningkatan modal sosial akibat dari terlaksananya program PEMP di Wilayah pesisir Kabupaten Meranti dan Kabupaten Rokan Hilir bahwa semangat kerja yang secara implisit merupakan

implikasi dari modal sosial secara umum dapat berkembang dengan hadirnya pemberdayaan masyarakat. Ibarat potensi kerja produktif yang lama tersimpan, bangkit kembali oleh rangsangan-rangsangan (motivasi). Realitasnya pemberdayaan EMP yang dikucurkan oleh pemerintah memiliki daya rangsang atau motivasi yang cukup kuat untuk membangkitkan kembali semangat kerja produktif dari para nelayan yang semula memang sudah baik menjadi lebih baik lagi.

Meningkatnya keberadaan modal sosial menjadi lebih baik sebagai akibat dari pemberdayaan masyarakat pesisir dari hasil penelitian ini menguatkan konsep pemberdayaan yang dikaji oleh Abu Samah, dkk (2009), didalam konteks pembangunan komunitas pada umumnya, dan khususnya membahas tentang penerapan konsep-konsep pemberdayaan di Malaysia. Hasil kajian mereka menunjukkan bahwa pemberdayaan melalui partisipasi adalah sebuah proses berkesinambungan di dalam merespon masalah yang dihadapi bersama, sehingga bisa mendapatkan kendali terhadap kehidupan mereka secara kolektif dalam konteks lingkungan sosial politik.

Sejalan dengan itu, hasil penelitian ini juga semakin menguatkan definisi pemberdayaan yang dijelaskan Usman (1995) sebagai “upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat”. Dalam konteks ini, secara implisit pemberdayaan mengandung unsur “partisipasi” yang seharusnya dimunculkan dari dalam diri masyarakat itu sendiri. Hal serupa ditunjukkan

Abu Samah, dkk (2009) di atas, di mana pemberdayaan melalui partisipasi merupakan proses yang berkelanjutan terhadap respon masyarakat menghadapi masalah secara bersama-sama.

Pada era otonomi daerah ini partisipasi masyarakat menjadi unsur penting keberhasilan pembangunan, baik di tingkat nasional, daerah maupun di tingkat desa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Madekhan Ali, bahwa Otonomi Desa adalah kemandirian pemerintahan dan masyarakat desa dalam menyampaikan aspirasi, merencanakan kegiatan, menggali dana, mendanai pembangunan, dan mengontrol kegiatan pembangunan desa. (2007:97). Karena itu keberadaan modal social didalam masyarakat harus didayagunakan dan dioptimalkan. Karena sesungguhnya dalam setiap masyarakat pasti memiliki modal sosial hanya saja sudah lama tidak difungsikan karena sistem sentralisasi yang dianut Orde Baru mengharuskan segala sesuatu harus mengikuti apa yang berasal dari pusat.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, jika diamati secara parsial pengaruh pemberdayaan EMP terhadap peningkatan modal sosial yang tumbuh pada masyarakat pesisir berdasarkan indikator-indikator refleksi dari pemberdayaan diketahui bahwa usaha SPDN memiliki pengaruh yang dominan terhadap berkembangnya modal sosial terutama pada dimensi kepercayaan (*trust*) dan jaringan (*network*). Hadirnya usaha SPDN sebagai salah satu item program PEMP di tengah-tengah masyarakat pesisir semakin meningkatkan sikap saling percaya antar

sesama kelompok masyarakat pesisir di dalam melakukan pekerjaan penangkapan ikan. Artinya, pemberdayaan EMP yang dilaksanakan melalui usaha SPDN telah mampu mempengaruhi modal sosial menjadilebih baik. Demikian halnya dengan hubungan-hubungan yang tersusun akibat interaksi sosial antar individu kelompok dan di luar kelompok (jaringan) semakin terbentuk secara baik dengan hadirnya usaha SPDN. Hal ini dimungkinkan oleh semakin mudahnya memperoleh bahan bakar minyak (BBM) sebagai salah satu faktor produksi utama setelah kapal dan seperangkat alat penangkapan ikan atau hasil laut lainnya. Mudahnya akses BBM tersebut menumbuhkan etos kerja yang lebih baik yang mana sudah menjadi kelaziman (manusiawi) bahwa sikap malas bekerja terkadang muncul sebagai akibat kurangnya keberdayaan ekonomi di dalam proses produksi, apalagi jika hal tersebut bersentuhan langsung dengan faktor produksi penting seperti BBM.

Selanjutnya item penting kedua setelah SPDN dari program PEMP yang telah dilaksanakan di Meranti dan Rokan Hilir adalah modal usaha dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Walaupun umumnya masyarakat nelayan telah memiliki fasilitas penunjang usaha, seperti kapal (motor atau perahu), jaring atau pukat, alat pancing dan sebagainya, namun kenyataannya di dalam melakukan usaha penangkapan kendala yang sangat dirasakan adalah kurangnya modal usaha. Sebagian besar bahkan hampir seluruh nelayan responden di dalam melakukan usaha penangkapan ikan dan hasil laut lainnya memiliki modal

yang sangat minim. Hal ini secara langsung ataupun tidak langsung dapat berakibat pada rendahnya hasil penangkapan (produksi). Pengaruh langsungnya adalah berkaitan dengan biaya variabel (*variable cost*) yang dikeluarkan, seperti: pembelian BBM, upah tenaga kerja, ransum dan lain-lain. Di samping itu, kapal (motor atau perahu), iaring atau pukot, alat pancing dan perlengkapan alat tangkap lainnya sebagai modal tetap dari pembiayaan awal melakukan usaha disinyalir masih belum memadai jika diukur berdasarkan rasio antara jumlah modal tetap dan besarnya potensi hasil laut yang bisa diperoleh. Ditambah lagi dengan LKM yang selama ini dikelola sendiri tidak berfungsi dengan baik akibat kurangnya bimbingan dan aksesibilitas mendapatkan bantuan pendanaan dari perbankan dan sebagainya. Keadaan seperti ini ternyata dapat berpengaruh pada etos kerja nelayan yang semula baik, sebab juga berkaitan dengan keharusan melaut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga mereka menjadi menurun.

Kekuatan modal sosial dalam masyarakat nelayan dapat mengalami degradasi akibat kurangnya keberdayaan ekonomi di dalam melakukan aktivitas melaut. Meskipun gejala itu bukan merupakan sesuatu yang khas di Indonesia namun intinya, modal sosial (*social capital*) yang dimiliki sebagian masyarakat Indonesia tampak semakin menipis (Barliana, 2011). Oleh karena itu, kucuran dana dari pemerintah untuk modal usaha dan pendirian LKM yang disebut LEPP-M3 melalui program PEMP tersebut telah memberikan daya rangsang dan motivasi secara

nyata terhadap penguatan kembali dari modal sosial yang sudah ada. Pada kasus di Kabupaten Meranti dan Rokan Hilir, keberadaan kedai pesisir sebagai salah satu item dari program PEMP nampaknya belum besar perannya dalam keberhasilan penguatan eksistensi modal sosial pada masyarakat pesisir, namun sedikitnya telah memberikan kontribusi walaupun belum secara nyata.

Temuan ini belum banyak didukung oleh hasil kajian empirik yang pernah ada sebab kebanyakan dari riset-riset terdahulu hubungan antara pemberdayaan dan modal sosial hanya dilihat dari sisi pengaruh modal sosial terhadap pemberdayaan, salah satunya seperti penelitian terbaru yang dilakukan Yuliarmi (2011). Pada penelitian tersebut salah satu tujuan penelitiannya adalah untuk menguji pengaruh modal sosial terhadap tingkat pemberdayaan IKM (Industri Kecil Menengah) di Provinsi Bali. Dalam penelitian ini tidak lagi mengkaji hal yang sama. Pentingnya melihat pengaruh dari sisi terbalik, yaitu pemberdayaan terhadap modal sosial adalah berangkat dari fenomena yang terjadi pada masyarakat, khususnya pada masyarakat pesisir yang memiliki budaya kerja yang berperan penting di dalam membentuk modal sosialnya telah mulai mengalami degradasi akibat kurangnya daya rangsang dan unsur-unsur motivasi. sehingga dalam hal ini penting untuk mengamati peranan pemberdayaan sebagai salah satu daya rangsang, pendorong atau motivasi sebagaimana dikemukakan Freire (1992) terhadap pembentukan ataupun

peningkatan keberadaann modal sosial dalam suatu masyarakat.

Modal sosial memang memiliki peran penting di dalam mensukseskan program pemberdayaan untuk kesejahteraan masyarakat, namun kenyataan menjelaskan bahwa modal sosial itu sendiri akan wujud secara nyata jika ada rangsangan sebagai motivasi baik dari dalam masyarakat pesisir itu sendiri, maupun dari pihak luar misalnya pemerintah. Program pemberdayaan masyarakat yang dikucurkan pemerintah ternyata sangat membantu masyarakat terutama didalam mengatasi masalah-masalah yang berkaitan langsung dengan sistem kerja. Kehadiran program pemberdayaan di tengah-tengah masyarakat telah membangkitkan rasa kebersamaan, saling percaya, dan bantu membantu satu sama lain, apalagi bantuan modal usaha dari program PEMP yang memang ditujukan untuk kelompok bukan individu nelayan, sehingga hal itu tentu akan lebih mendorong kerja sama yang lebih baik.

Namun ada juga sebagian daerah yang kelompok nelayannya tidak berjalan dengan baik seperti yang dituturkan oleh salah satu responden informan Ismail MN (Nelayan, 53 tahun) sebagai berikut:

“Menurut saya, pemerintah harus lebih selektif dalam melibat masyarakat pesisir, karena pembagian kelompok nelayan di daerah kami belum berjalan dengan baik....”

Di beberapa kelompok nelayan yang diamati, ditemukan adanya rasa kebersamaan dan saling percaya serta bantu membantu di antara kelompok masyarakat

demikian terpola sehingga jika ada salah satu anggota dari kelompok masyarakat yang kekurangan bahan-bahan dan uang untuk membiayai kegiatan penangkapan, yang lainnya bersedia untuk membantu. Selain itu, Jika salah seorang nelayan atau lebih belum mau kembali ke darat maka hasil tangkapannya bisa dititipkan kepada teman yang kembali lebih awal dengan hanya menyertakan bahan pendingin (es) agar bisa sampai kepada pihak keluarganya atau menunggu nelayan penitip tersebut kembali dari laut dalam keadaan tidak rusak (masih segar). Sebagaimana penuturan informan lainnya Ibrahim (Nelayan Bagan Siapi-api, 57 tahun), berikut:

“Disini ada kelompok nelayan. Fungsi dari kelompok nelayan disini ya, bias sebagai tempat simpan pinjam modal, baik uang atau alat nelayan. Anggota tiap kelompok kalau berlayar juga saling membantu, misalnya ada yang mau pulang dari laut, anggota lainnya yang masih berlayar bisa nitip hasil tangkapannya untuk dibawa ke pantai.”

Hal ini menandakan bahwa modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat pesisir semakin tumbuh dan berkembang secara meluas tidak terbatas pada kelompoknya saja. Jika dikembalikan pada hasil analisis pengaruh pemberdayaan EMP terhadap modal sosial yang secara statistik menunjukkan angka yang signifikan dan juga dikuatkan oleh penuturan informan di atas, maka dapatlah dipastikan bahwa keberadaan modal sosial yang semakin baik dan meluas dalam masyarakat pesisir tersebut dipengaruhi oleh program pemberdayaan EMP. Aninya, pemberdayaan EMP mampu meningkatkan

modal sosial. Hal ini semakin menguatkan penjelasan Freire (1992) tentang proses pemberdayaan sebagai metode yang dapat mengubah persepsi, motivasi atau dorongan seseorang dalam lingkungan masyarakatnya sebagaimana diuraikan di atas, di mana proses pemberdayaan tersebut memungkinkan individu beradaptasi dengan lingkungannya, menumbuhkan kesadaran dan motivasi atau dorongan dalam dirinya.

Tanggapan Responden

▪ Modal usaha

Menurut nelayan di Meranti pada Kecamatan Tanah Merah bahwa banyak nelayan yang kekurangan modal. Untuk itu dibutuhkan bantuan khusus modal untuk nelayan (Zaidi dan Ahmad, Nelayan). Hal ini dipertegas oleh Isa O (Nelayan, 55 Tahun) yang menuturkan bahwa hendaknya pemerintah lebih memihak kepada usaha perikanan karena hasil perikanan riau ini di Kabupaten Meranti juga termasuk nelayan terbanyak.

Di Kecamatan lain seperti Kecamatan Sei Junjung dan Kecamatan Sungai Batang Meranti para nelayan juga butuh perahu, jaring dan modal untuk menunjang usaha mereka (M. Supri). Hal ini disebabkan peralatan seperti perahu dan lainnya perlu diperbaharui karena perahu mereka sekarang sudah tidak layak digunakan (Usman). Untuk memperahui peralatan yang ada, nelayan merasa sulit karena hasil tangkapan tidak pasti terkadang banyak, terkadang sedikit. Sehingga mereka sulit untuk mengembalikan modal usaha mereka.

Untuk itu nelayan mengharapkan bantuan pemerintah untuk modal usaha mereka jelas Safnah. Diharapkan bantuan perahu dan alat tangkap ikan dari pemerintah. Keluhan yang sama juga diungkapkan oleh nelayan di Kabupaten Rokan Hilir. Nelayan mengharapkan lebih memperhatikan kebutuhan alat penangkapan ikan yang dimiliki nelayan (Jasman). Di Bagan Siapi-api, para nelayan mengharapkan kepada pemerintah untuk membantu mempermudah nelayan dalam mengajukan permohonan pinjaman untuk modal usaha mereka. (Alan)

Usaha yang mereka tempuh selama ini, beberapa nelayan melakukan peminjaman uang kepada kelompok nelayan untuk modal usaha mereka. Namun modal tersebut hanya cukup untuk membeli minyak dan sebagian modal usaha menurut Samri. Zid (2011:37) mengatakan dalam jurnalnya dengan judul Fenomena Strategi Nafkah Keluarga Nelayan : Adaptasi Ekologis di Cikahuripan-Cisolok, Sukabumi bahwa *“Bagi keluarga yang tidak memiliki simpanan, jika mereka membutuhkan uang tunai seringkali meminjam kepada juragan pemilik perahu. Pinjaman tersebut dibayar dengan cara dipotong dari hasil tangkapan, sebagian dari keluarga buruh nelayan mengaku seringkali meminjam kepada Bank Keliling”*.

Demikian pula modal usaha dengan bantuan berbentuk tunjangan yang tidak sesuai dengan tujuan nelayan, sesuai penuturan responden Bapak Hadi sebagai berikut:

“Kemarin kan juga ada bantuan ya, tunjangan, tapi tunjangan itu tidak sesuai dengan tujuan mas gitu loh, tidak sesuai dengan kebutuhan. Sekali gagal udah berhenti sudah. Kenapa ko gagal ? ya karena setengah setengah itu tadi, contohnya sekarang udah jadi ikan sudah ada,, tapi untuk membuat kestabilan air masih kurang, begitu ada perubahan cuaca ada perubahan alam kita nggak bias berketuk akhirnya ikan kita mati kebanyakan ya gitu”.

Selain itu Beliau juga memaparkan bahwa dana bantuan sebagian seringkali digunakan secara sama rata sama rasa,

“ Kalau menurut pandangan saya karena disini kan sudah berdiri sebuah kelompok, kelompok ini dari pihak nelayannya kalau bantuan itu adanya modal dari bantuan dari pemerintah.nelayannya tahu, pengurusnya juga tahu. Kedua duanya sudah tahu. Akhirnya dari pengurusnya sendiri akan menggulirkan akan susah mas, karena tahu ini bantuan. Mau mengembalikan juga lalai, kebanyakan nggak mau. Dan pinjamannya pun tidak sesuai”

▪ **Lembaga Keuangan Mikro (LKM)**

Menurut nelayan di Rokan Hilir para nelayan mengharapkan perlu adanya Lembaga keuangan Mikro (LKM). Hal yang sama juga diharapkan oleh nelayan di Kelurahan Sungai Batang Meranti. Para nelayan meminta diaktifkan Lembaga Keuangan Mikro bekerjasama dengan pemerintah dalam menyalurkan bantuan dana. Sehingga nelayan mampu menjalankan usaha mereka dan berdampak positif bagi daerahnya. Para nelayan mengharapkan LKM memudahkan mereka untuk

melakukan simpan pinjam di daerah mereka. Menurut Ahmad di Centai, selama ini belum ada koperasi khusus nelayan. Koperasi yang ada selama ini lebih memfokuskan kepada pedagang. Sehingga nelayan lebih banyak membeli di koperasi pedagang ini. Upaya ini juga mempermudah nelayan dalam berusaha mencari nafkah.

Di Kedabu Rapat Kabupaten Rokan Hilir, para nelayan mengharapkan lembaga keuangan mikro ini lebih memudahkan pinjaman untuk usaha kecil. Sehingga mereka bisa memperbesar usaha yang ada selama ini. Disamping itu para nelayan di Kedabu Rapat Rokan Hilir mengharapkan Lembaga Keuangan Mikro ini lebih banyak lagi menggulirkan pinjaman untuk pengembangan usaha nelayan. sesuai penuturan responden Bapak Sih Hadi Umar Said sebagai berikut:

“ Disini sistem kelompok, KUD dan sebagainya kelihatannya berhasil. Masyarakat tidak lebih dari kemiskinan, tetep miskin itu bisa dicek kelapangan tidak harus ke laporan. Sekalipun KUD nya sudah berkembang begini-begini tapi lihatnya saja masyarakat dikanan-kirinya berkembangnya kayak apa kesenjangan nya kayak apa.”

2. Pengaruh Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir terhadap Kesejahteraan

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) merupakan salah satu konsepsi program Departemen Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2001 yang dirancang secara umum bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan

kultur kewirausahaan, penguatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), penggalangan partisipasi masyarakat dan kegiatan usaha ekonomi produktif lainnya yang berbasis sumberdaya lokal dan berkelanjutan., sehingga dapat mendorong dinamika pembangunan sosial ekonomi di kawasan pesisir.

Pendapat dari Cook (1994) menyatakan pembangunan masyarakat merupakan konsep yang berkaitan dengan upaya peningkatan atau pengembangan masyarakat menuju kearah yang positif. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa secara langsung pengaruh pemberdayaan terhadap kesejahteraan tidak signifikan, bermakna bahwa program PEMP yang dikurcurkan belum mampu memberikan kontribusi nyata terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir. Tingkat kesejahteraan yang dicapai selama ini lebih dipengaruhi oleh faktor lain terutama modal sosial.

Program PEMP hingga saat ini masih terus mencari bentuk ideal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Setidaknya terdapat 2 (dua) elemen penting dalam memperkuat peran PEMP sebagai akselerator peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, yaitu penguatan peran kelembagaan (*institutional strengthening*) pengelola program, dan peningkatan kapasitas (*capacity building*) lembaga ekonomi mikro. Namun demikian, kedua elemen ini tidak dapat berperan secara optimal dan berkelanjutan jika tidak didukung oleh elemen lainnya, seperti Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP),

keterlibatan *stakeholders* dan kemitraan yang dibangun oleh program dengan instansi terkait lainnya.

Sebetulnya pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir telah mampu memberikan dampak positif terhadap perubahan status ekonomi masyarakat pesisir namun hasilnya belum menunjukkan keberhasilan yang nyata. Beberapa hal yang menjadi penyebab dan sekaligus merupakan penjelasan dari realitas program PEMP di dalam perannya mengentaskan kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat pesisir. **Pertama**, berkaitan dengan tingkat kontinuitas program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir yang relatif masih rendah.

Kedua, program PEMP yang dilaksanakan melalui 4 (empat) item, yaitu modal usaha, pendirian LKM, kedai pesisir dan penyediaan SPDN tidak diikuti oleh bimbingan dan pelatihan dasar-dasar pengelolaan secara lebih profesional kepada individu-individu atau kelompok dari masyarakat yang ditunjuk untuk mengelola keempat usaha PEMP di tiap-tiap wilayah, sehingga sering terjadi kesalahan administrasi maupun teknis yang kemudian hal tersebut menjadi kendala di dalam mencapai tujuan dari program PEMP itu sendiri. Padahal dengan modal sosial yang dimiliki masyarakat dapat menjadi aset penting dengan hadirnya program PEMP, artinya jika bimbingan dan pelatihan wirausaha dimasukkan sebagai sub-item ke dalam pelaksanaan program PEMP dan dilaksanakan secara profesional-tidak sekedar pemenuhan realisasi alokasi dana sesuai pos anggaran dan tepat tangan-maka program pemberdayaan masyarakat tersebut akan lebih

efektif pengaruhnya terhadap perubahan keadaan ekonomi masyarakat ke arah yang lebih baik.

Ketiga, rendahnya SDM masyarakat pesisir yang disinyalir merupakan faktor yang bertanggung jawab terhadap kurang optimalnya pelaksanaan pemberdayaan EMP untuk kesejahteraan masyarakat tersebut dapat dipastikan berdampak pada pengelolaan PEMP yang kurang baik, khususnya pada penanganan kedai pesisir dan LKM sebagai sarana untuk melayani kebutuhan-kebutuhan pokok sehari-hari rumah tangga dan kebutuhan modal untuk membiayai aktivitas melaut para nelayan. Sering kurang tersedianya bahan-bahan kebutuhan atau keterlambatan ketersediaan di kedai pesisir menyebabkan nelayan menunda kegiatan mereka. Atau mengurangi jam kerja untuk melaut sebab harus melakukan aktivitas sampingan guna memenuhi kebutuhan rumah tangga yang seharusnya dipenuhi melalui kedai pesisir secara kredit. Sementara itu, mereka juga terpaksa harus meminjam modal untuk biaya melaut ke tempat lain (di luar LKM).

Demikian pula pelayanan keuangan pada Lembaga Keuangan Mikro yang sering terlambat atau permintaan mereka yang tidak dikabulkan sepenuhnya, sesuai penuturan responden Aspan (51 tahun) sebagai berikut:

“masyarakat pesisir biasanya minjam duit sama ketua kelompok, tapi karena dana talangan yang dimiliki ketua kelompok tidak besar, biasanya nelayan pinjam ke cukong atau rentenir yang prosesnya cepet, ada yang ke pegadaian, gadaai

kapalnya demi tambahan modal. Lembaga Keuangan ada, tapi kurang bersahabat. Proses birokrasinya lama.”

Hasil penelitian ini sejalan dengan pernyataan Saefuddin dkk.(2003), bahwa pemerintah telah meluncurkan berbagai program pemberdayaan ekonomi seperti Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dan program lainnya yang tujuan utamanya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, namun secara empiris didapati bahwa pemberdayaan tersebut kurang berhasil. Jebakan kegagalan program terjadi karena implementasi program tidak sesuai dengan konsep yang menjadi referensinya. Artinya sekalipun konsep tersebut baik, aplikasi dilapangan belum tentu menjamin bahwa suatu program pemberdayaan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, sehingga hasilnya belum maksimal. Hal ini diduga bahwa model pemberdayaan yang digunakan belum sesuai dengan obyek yang akan dituju. Sehingga persoalan kemiskinan masih menjadi agenda besar dalam proses pembangunan.

Pendidikan dalam kalangan masyarakat yang diberdayakan masih menjadi faktor penentu dari keberhasilan pemberdayaan. Selain itu karakteristik kelembagaan juga memiliki peran penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan, sebab hal ini berkaitan erat dengan tingkat kelancaran membayar kewajiban (angsuran) dana bergulir, sebagaimana hasil penellian Ridwan (2008) tentang tingkat efektivitas program pemberdayaan (PEMP dan P24K) dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat

di Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor/konstruk pendidikan pengaruhnya tidak signifikan terhadap kesejahteraan nelayan (pemanfaatan program PEMP), sementara faktor karakteristik kelembagaan pengaruhnya signifikan terhadap tingkat kelancaran pembayaran angsuran, sehingga Hal ini akan berdampak pada kelambatan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya menghambat kemajuan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh hasil penelitian Fedriansyah (2001) tentang Evaluasi Kinerja PEMP Di Kecamatan Tugu Semarang dan Miraza (2009) mengenai implementasi Program PEMP di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat bahwa Program ini belum mampu menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan kondisi tersebut maka proses pemberdayaan masyarakat seharusnya memperhatikan sistem nilai dan kelembagaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat setempat. Jika tidak, maka tujuan program pemberdayaan itu sendiri tidak dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan. Sistem nilai dan kelembagaan yang ada dalam masyarakat merupakan modal sosial yang harus ditumbuhkembangkan sebab melalui modal sosial tersebut pemberdayaan EMP sebagai salah satu kebijakan pengembangan wilayah pesisir dapat dilaksanakan dengan pencapaian tujuan yang optimal, yaitu mengentaskan kemiskinan dan memajukan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Kondisi di mana program pemberdayaan PEMP belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir tidak terjadi pada seluruh kasus terkait kajian pemberdayaan masyarakat untuk kesejahteraan, sebab pada kasus yang lain seperti di Jawa Tengah dan beberapa wilayah lainnya di Indonesia, program pemberdayaan masyarakat telah berhasil memajukan kesejahteraan masyarakat wilayah tersebut. Hal ini dibuktikan melalui temuan hasil penelitian Widiastuti (2006) dengan judul penelitiannya “Program PEMP di kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Dan total sampel 67 orang ditemukan bahwa Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan kedai pesisir sangat bermanfaat bagi masyarakat walaupun pada Solar Pack Dealer untuk Nelayan (SPDN) tidak terlalu bermanfaat bagi masyarakat pesisir. Namun yang terpenting dari hasil penelitian tersebut adalah dalam pelaksanaan PEMP akses informasi sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa kajian yang sama juga menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir. Hasil studi yang dilakukan oleh Riana Faiza (2004) bahwa dengan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir mampu meningkatkan kesejahteraan yang tinggi bagi nelayan pengolah di Muara Angke. Hamdan (2005), keberhasilan program PEMP ditunjukkan melalui kelembagaan, pembentukan kelompok serta mekanisme perguliran dan penyerapan dana bantuan yang terlaksana dengan baik telah mampu meningkatkan usaha dan pendapatan

masyarakat, walaupun untuk keberlanjutan khususnya peguliran dana masih perlu perbaikan karena kendala lambatnya pengembalian pasca program. Kenyataan ini sulit dihindari sebab terkait erat dengan faktor human capital (pendidikan) dan karakteristik kelembagaan yang masih rendah sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, dalam agenda besar pembangunan ke depan, pemerintah sangat perlu memperhatikan beberapa faktor kendala untuk dicarijalan keluarnya.

Selanjutnya hasil studi Meriana (2008) pada keluarga nelayan di Lampung Barat menemukan bahwa melalui pemberian bantuan pinjaman untuk modal usaha telah mampu menaikkan pendapatan masyarakat, selain itu dari keseluruhan responden mengaku bahwa mereka mampu memenuhi kebutuhan pokoknya setelah memanfaatkan dana PEMP. Hal ini menandakan bahwa ada efek positif terhadap tingkat kesejahteraan pasca pelaksanaan program PEMP. Pemanfaatan bantuan secara benar dan tepat sasaran sebagai salah satu penentu keberhasilan mereka dalam memperbaiki kondisi kehidupan mereka.

Temuan yang sama oleh Aryansyah (2009) dalam studinya mengemukakan bahwa pelaksanaan program PEMP di Kabupaten Sukabumi melalui dana bantuan telah mampu menaikkan tingkat pendapatan rata rata perbulan 31,19 persen. Kemudian berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, Siagian (2008) dalam studinya menunjukkan bahwa dampak dari pemberdayaan masaarakat melalui program pengembangan kecamatan dengan kegiatan penyediaan sarana sosial, penyediaan

sarana ekonomi, penyediaan lapangan kerja telah berhasil dan berdampak positif terhadap pengentasan kemiskinan.

Belum mampunya program PEMP didalam peran sertanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kabupaten Meranti dan Rokan Hilir, menjadi bahan evaluasi bagi pelaksanaan program selanjutnya. Namun hal terpenting yang harus menjadi perhatian pemerintah adalah 2 (dua) hal sebagaimana dijelaskan di atas, yaitu tingkat kontinuitas (ke-istiqomah-an) kehadiran program yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah serta bimbingan atau pelatihan dasar-dasar pengelolaan lembaga pemberdayaan Secara lebih profesional kepada individu atau kelompok dari masyarakat pesisir sebelum atau pada saat program PEMP akan dilaksanakan. Sebagaitambahan juga perlu diperhatikannya sistem nilai dan kelembagaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat setempat.

Keadaan tersebut menandakan bahwa program pemberdayaan EMP belum mampu memberikan kesejahteraan untuk masyarakat, sehingga bisa dipastikan bahwa kesejahteraan yang dicapai masyarakat lebih diperankan oleh faktor modal sosial dan faktor-faktor lain di luar model persamaan kesejahteraan yang diprediksi. Walaupun persepsi masyarakat pesisir memiliki antusias yang tinggi terhadap keberadaan program PEMP di tengah-tengah mereka, namun perlu dipahami juga bahwa umumnya tanggapan masyarakat miskin terhadap program bantuan baik pemeritah ataupun dari non pemerintah untuk mereka selalu dinilai positif.

Penduduk miskin seperti masyarakat pesisir ini, umumnya memiliki keberdayaan ekonomi yang lemah. Hal ini ditandai dengan lemahnya daya beli terhadap kebutuhan-kebutuhan untuk rurnah tangga apalagi untuk usaha. Sehingga kehadiran program pemberdayaan EMP di atas yang sebetulnya diharapkan dapat berperan optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, realitasnya tidak serta merta dapat membantu masyarakat agar bisa keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu implementasi program PEMP Sebaiknya tidak hanya menerapkan sistem positif yang memperhalikan kemampuan dan profesionalitas masyarakat yang diberdayakan semata sehingga mengenyampingkan faktor modal Sosial yang mereka miliki.

Selain tingkat kontinuitas program PEMP yang relatif rendah yang merupakan implikasi bahwa porsi anggaran pemerintah untuk pembiayaan PEMP masih relatif kecil dan ditambah dengan rendahnya SDM masyarakatnya maka ketidakberdayaan ekonomi masyarakat pesisir juga menjadi kendala dan merupakan masalah krusial yang dihadapi pemerintah di dalam mewujudkan tujuan dan program pemberdayaan untuk kesejahteraan. Kompleksitas permasalahan di atas sebagai akibat keterbatasan sumber daya dari kedua belah pihak yaitu pemerintah dan masyarakat, harus dicarikan jalan keluarnya yaitu melalui kebijakan yang lebih partisipatif dengan menitikberatkan pada sistem nilai dan kelembagaan yang bertaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, dengan pertimbangan modal sosial yang

dimiliki masyarakat yang juga cenderung semakin berkembang akibat intervensi pemerintah melalui pemberdayaan, maka sekali lagi ditekankan bahwa intervensi pemerintah yang lebih besar khususnya untuk pengalokasian dana pembangunan dalam bidang pemberdayaan masih sangat diperlukan agar masyarakat dapat meningkatkan pendapatannya sehingga bisa mencapai tingkat kesejahteraan yang sesuai harapan bersama.

Sebetulnya pemberdayaan EMP yang dilaksanakan selama ini telah banyak meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat pesisir, secara statistik telah menunjukkan angka yang signifikan. Hal ini terungkap dari penuturan responden informan Ramli (Pedagang, 50 tahun) berikut:

“... Dari program ekonomi pesisir, masyarakat bisa memanfaatkan bantuan pemerintah untuk penghidupan yang lebih baik. Oleh karenanya, masyarakat merasa sangat terbantu sekali dengan adanya program itu. Akan tetapi, program itu berjalan kurang efektif dan kurang merata baik untuk pedagang kedai pesisir dan para nelayan pesisir...”

Berdasarkan uraian-uraian dan hasil wawancara di atas, terutama penjelasan sub-sub bab sebelumnya dari hasil penelitian ini, maka di balik kurang berhasilnya pemberdayaan EMP untuk kesejahteraan masyarakat pesisir, ada dua hal penting yang patut dipertimbangkan terkait dengan masih perlunya pemberdayaan EMP tersebut dilaksanakan, yaitu:

- a. Modal sosial cenderung semakin tumbuh dengan lebih baik jika ada pemberdayaan EMP di satu pihak, dan modal sosial yang semakin kuat tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pihak lain' Artinya, ada harapan bahwa pemberdayaan EMP untuk tujuan kesejahteraan dapat dicapai melalui mediasi kekuatan modal sosial. Hal ini akan dijelaskan secara detail pada sub bab selanjutnya.
- b. Walaupun belum optimal peran dari pemberdayaan EMP untuk kesejahteraan, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa pemberdayaan EMP sangat membantu masyarakat pesisir untuk keluar dari kesulitan. Kesulitan ekonomi, sebagaimana penuturan responden informan di atas.

Tanggapan Responden

▪ Pendidikan

Para nelayan di Rokan Hilir mengharapkan pemerintah lebih memperhatikan fasilitas pendidikan di daerah mereka. Menurut Parman, pemerintah lebih meningkat memperhatikan secara serius dalam bidang pendidikan. Di Meranti, Bujang berpendapat bahwa pembangunan fasilitas dan kualitas pendidikan lebih ditingkat lagi.

Menurut pendapat Nurhayati di Bagan Siapi-api, pemerintah agar lebih memperhatikan kualitas pendidikan di daerah mereka. Karena dari pendidikanlah tercapai kesejahteraan di daerah mereka. Untuk itu jelas

dibutuhkan bantuan dalam sarana dan prasarana pendidikan oleh pemerintah.

Bantuan pemerintah dalam menetapkan harga ikan juga diharapkan nelayan, sehingga meningkatkan pendapatan nelayan dan mereka dapat menyekolahkan anak-anak mereka ke tingkat lebih tinggi.

▪ **Kondisi Fasilitas Penunjang Usaha Dan Kebutuhan Rumah Tangga**

Banyak nelayan yang melakukan usaha menangkap ikan dengan menggunakan perahu dan peralatan penangkapan ikan yang di pinjam dari orang lain. Di Kecamatan Sungai Batang Meranti menurut Usman, di butuhkan perahu sendiri untuk nelayan karena masih ada nelayan yang meminjam perahu dan alat tangkap ikan kepada nelayan lain. Hal senada juga diungkapkan oleh nelayan di Kedabu Rapat, nelayan untuk mencari ikan ada yang meminjam dan menyewa perahu, perahu yang dimiliki sudah tua dan bocor. Menurut Herman T., selain perahu nelayan membutuhkan alat-alat alat nelayan seperti jaring (jala). Hal ini dikarenakan peralatan mereka banyak yang sudah rusak. Sedangkan untuk membeli peralatan baru, mereka kesulitan keuangan.

3. Pengaruh Modal Sosial terhadap Kesejahteraan

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian terdahulu bahwa modal sosial merupakan salah satu sumberdaya masyarakat yang terbentuk melalui hubungan antar individu dalam kelompok masyarakat yang bersangkutan. Hubungan tersebut dituangkan dalam wujud kerja sama

antar kelompok masyarakat untuk tujuan penguatan potensi sumberdaya dengan memperhatikan dimensi-dimensi dari modal sosial itu sendiri.

Berdasarkan hasil analisis data, ditemukan bahwa modal sosial berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir. Artinya, modal sosial yang semakin baik turut memberikan kontribusi yang nyata terhadap peningkatan kesejahteraan. Melalui kecenderungan saling tukar kebaikan (Reciprocity) antar individu, kepatuhan terhadap aturan-aturan yang telah disepakati bersama (Norms), hubungan-hubungan yang tersusun akibat interaksi sosial (Network), kejujuran yang dimiliki (trust), dan tingkat partisipasi anggota dalam kelompok (Group), masyarakat pesisir telah mampu menghantarkan kelompoknya pada kondisi ekonomi yang lebih baik. Berikut penjelasan dimensi-dimensi modal sosial berdasarkan besaran nilai (masing-masing loading faktor dan T-Statistik) yang membentuk variabel laten modal sosial di dalam mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir di Meranti dan Rokan Hilir, sebagai berikut:

a. **Jaringan (Network)**

Kesejahteraan masyarakat pesisir terutama diperoleh melalui kekuatan jaringan, yaitu hubungan-hubungan yang tersusun akibat interaksi sosial antar individu baik di dalam maupun di luar kelompok masyarakat pesisir. Dalam konteks demikian, hubungan yang baik antar anggota masyarakat menciptakan jaringan yang bersifat mutualis, dan bahkan mengalahkan individualitas, yang biasanya melingkupi karakteristik budaya barat. Dengan

kata lain, jika seseorang mengalami persoalan & tidak mampu mengatasinya sendiri, warga tersebut dibantu warga lainnya secara sukarela. Dengan hubungan sosial yang erat; pola polarisasi, pengkotak-kotakan, dan pembilahan sosial menjadi luntur (Gunawan, 2005:386)

Jaringan antara kelompok masyarakat pesisir dan jaringan di luar kelompok masyarakat pesisir sebagai wujud interaksi sosial mereka inilah yang kemudian membuka peluang-peluang kerjasama yang produktif sehingga proses penangkapan ikan lebih efektif dan hasilnya menjadi lebih meningkat. Peningkatan hasil penangkapan akan meningkatkan pendapatan sehingga kesejahteraan menjadi lebih baik.

Adapun item jaringan yang tersusun antara lain membina hubungan baik dengan pihak pengurus atau pengelola usaha dari pemberdayaan masyarakat yang meliputi kedai pesisir, SPDN(Pertamina), dan LKM LEPP-M3.

Selain itu juga membina hubungan baik dengan pihak pemerintah setempat tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat diluar komunitas masyarakat pesisir, sehingga jika ada permasalahan yang dampaknya meluas ke masyarakat maka dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat atau kepentingan bersama.

Demi kelancaran usaha LKM maka para anggota kelompok juga menawarkan kepada orang lain untuk menjadi nasabah di LKM dan berbelanja di kedai pesisir. Sedangkan untuk kegiatan perawatan atau pemeliharaan ikan agar tetap segar sampai ke pasar dan juga kegiatan

pemasarannya maka para anggota kelompok membina hubungan baik dengan pengusaha yang memiliki alat pendingin untuk kebutuhan suplai es atau dengan pihak pemasaran yang dalam hal ini pengusaha pengumpul yang akan menjualnya di pasar. Oleh karena itu, pasar yang disentuh oleh kebanyakan nelayan adalah pasar input berupa ikan segar dan ikan yang telah diasapi.

b. Kepercayaan (Trust)

Kesejahteraan yang diperoleh juga diperankan oleh tingginya tingkat kepercayaan masyarakat baik antar individu maupun antar komunitas, yang tidak lain sebagai akibat perilaku jujur yang dimiliki sebagian besar individu masyarakat pesisir, sehingga memunculkan sikap saling percaya, konsisten dalam berperilaku, tanggung jawab, saling menghargai dan menghormati serta ketulusan. Kepercayaan itu sendiri berakar pada norma sosial, adat istiadat dan etika sosial yang dimiliki setiap kelompok atau komunitas secara bersama-sama.. Pada saat suatu masyarakat memiliki saling percaya yang kuat maka pada saat itu modal sosial yang dimiliki masyarakat tersebut juga tinggi, sehingga mencapai suatu tujuan bersama yaitu kesejahteraan sosial.

Dalam kegiatan melaut, kerjasama antar warga masyarakat sangat erat, seperti dengan meminjamkan peralatan, maupun modal. Kerjasama dalam kegiatan perekonomian maupun sosial berlangsung dengan landasan kepercayaan. Karena itu tidak ada kekhawatiran apa yang dipinjamkan tidak kembali, atau pemilik kapal ditipu oleh nahkoda dan ABK nya. Pinjam meminjam

dalam bentuk uang tanpa bunga adalah hal yang biasa terjadi dalam kelompok masyarakat pesisir. Sikap saling percaya satu sama lain serta komitmen yang tinggi untuk mengembalikan pinjaman tepat waktu menjadikan hubungan antar masyarakat senantiasa terjaga. Hubungan yang baik inilah yang kemudian menjadi salah satu modal sosial bagi masyarakat pesisir mencapai kesejahteraannya.



Gambar 5.13 Bentuk kerjasama antar nelayan

Sumber: Dokumentasi, 2015

c. **Timbal Balik (*Reciprocity*)**

Kecenderungan saling tukar kebaikan antar individu dalam kelompok masyarakat pesisir (*Reciprocity*) juga merupakan dimensi yang memberikan penguatan terhadap modal sosial di dalam perannya meningkatkan kesejahteraan bersama.

Menurut Harper dan Gillespie (1997), hubungan timbal balik antar anggota masyarakat merupakan elemen yang mendasar dalam strategi nafkah rumah tangga miskin. Hubungan timbal balik pada masa lampau seringkali berupa tukar menukar tenaga kerja dalam

kegiatan produksi maupun social kemasyarakatan. Ketika ekonomi berkembang, bentuk hubungan timbal balik ini mengalami perkembangan. Model tukar menukar tenaga kerja berkembang menjadi model kerja sama baik berdasarkan bagi hasil maupun pengupahan.

Melalui hubungan timbal balik ini para nelayan melangsungkan aktivitas ekonominya dengan saling bantu membantu, Satu sama lain saling meminjam alat dan peralatan (perahu, mesin, jaring dan sebagainya), saling menjaga keamanan terhadap peralatan penangkapan ikan (karamba, sero, dan lain-lain), saling memfasilitasi di dalam memecahkan masalah-masalah dalam kegiatan usaha. Kesemuanya itu tidak hanya diwujudkan di antara anggota kelompok dalam kegiatan usaha, tetapi juga antar masyarakat secara umum dalam kehidupan sehari-hari.



Gambar 5.14 Beberapa alat nelayan yang digunakan sesama anggota kelompok nelayan

Sumber: Dokumentasi, 2015

d. Kelompok (*Group*)

Tingkat partisipasi anggota dalam kelompok seperti banyaknya jumlah anggota, frekuensi partisipasi di dalam

pertemuan dan pengambilan keputusan, kontribusi sumber pendanaan dan keikutsertaan di dalam pengumpulan dana kelompok sangat menentukan kelancaran kegiatan ekonomiyang dilakukan baik secara individu maupun bersama-sama. Jika ada salah seorang atau beberapa anggota yang kekurangan dana atau modal untuk melaut maka anggota lainnya yang memiliki dana akan berusaha untuk memberikan bantuan pinjaman, baik sesama anggota maupun dari luar anggota masyarakat pesisir, misalnya dari pihak pengusaha atau pengumpul. Hal ini dilakukan jika dana yang tersedia di LKMLEPP-M3 tidak mencukupi untuk mendanai kegiatan usaha.

Oleh karena itu, peran pemerintah masih sangat dibutuhkan terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung, termasuk didalamnya kebijakan pemerintah, akses permodalan, pasar, dan tata ruang kawasan pesisir. Disamping itu harus didukung pula oleh kegiatan ekonomi masyarakat yang berbasis pada potensi sumberdaya local dengan memprioritaskan partisipasi masyarakat setempat dan memperhatikan skala dan tingkat kelayakan ekonomi.

Sebetulnya didalam kelompok, partisipasi anggota tidak hanya yang berkaitan dengan kegiatan usaha, tetapi juga di luar bidang pengembangan usaha, misalnya bidang pendidikan dan kesehatan. Membantu memberikan pinjaman atau secara sukarela kepada anggota kelompok yang sedang menyekolahkan anaknya atau yang anggota keluarganya sedang mengalami sakit. Kesemuanya itu dibicarakan dan diputuskan di dalam setiap pertemuan

kelompok. Hal tersebut tidak terlepas dari peranan modal sosial yang ada di dalam masyarakat yang membuat masyarakat desa bersedia berpartisipasi dalam pembangunan di desanya. Karena itu anggapan yang mengatakan bahwa pembangunan hanya butuh modal ekonomi dan modal fisik semata tidaklah tepat.



Gambar 5.15 Salah satu bentuk kebersamaan masyarakat nelayan

Sumber: Dokumentasi, 2015

e. **Norma (Norms)**

Kepatuhan terhadap aturan-aturan (Norms) juga merupakan indikator modal sosial yang turut menjadi penyebab meningkatnya kesejahteraan masyarakat pesisir didaratan Meranti dan Rokan Hilir. Modal sosial yang berwujud norma-norma dan jaringan keterkaitan tersebut merupakan prakondisi bagi perkembangan ekonomi, dan prasyarat mutlak bagi terciptanya tata pemerintahan yang baik dan efektif (Kushandajani, 2008:26). Dengan demikian modal sosial merupakan prasyarat bagi

keberhasilan pembangunan. Hal ini lah yang coba akan dilihat pada masyarakat di Meranti dan Rokan Hilir

Norma yang berlaku dalam masyarakat pesisir adalah yang berkaitan Dengan pengelolaan modal usaha, kedai pesisir, LKM dan SPDN yang berlandaskan pada budaya masyarakat melayu pesisir sebagai suku dominan di wilayah Riau pesisir. Kebanyakan dari aturan tersebut tidak tertulis namun secara umum telah dipahami oleh setiap anggota komunitas. Sedangkan aturan atau norma yang berlaku berkaitan dengan usaha pemberdayaan diatas, bisa tertulis dan juga tidak tertulis. sehingga di sini nampak ada keselarasan antara aturan-aturan dari keduanya, yang selebihnya tinggal ditaati atau tidak. Aturan-aturan yang berlaku baik dalam usaha pemberdayaan maupun adat atau budaya senantiasa dipatuhi oleh anggota kelompok masyarakat pesisir.

Potensi kemampuan berkelompok ini tergantung pada besarnya persinggungan nilai-nilai dan norma-norma yang dimiliki bersama dalam suatu komunitas dan kemampuan seseorang untuk mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Dengan kata lain kemampuan berkelompok hanya dapat terjadi jika ada saling percaya di antara anggota kelompok atau komunitas bersangkutan.

Misalnya harus menyetorkan dana sosial untuk kepentingan bersama (masyarakat pesisir), selalu mengikuti pertemuan kelompok yang telah disepakati bersama agar setiap keputusan yang diambil dapat disaksikan dan disetujui secara bersama-sama terutama

yang berkaitan dengan cara mengembangkan usaha yang tidak merusak ekosistem laut, seperti tidak menggunakan bahan peledak dan racun dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan dan seterusnya.



Gambar 5.16 Pelarangan Penggunaan Alat Tangkap yang merusak ekosistem laut

Sumber: Dokumentasi, 2015

Peran nyata modal sosial didalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dalam temuan penelitian ini, jika ditarik ke level makro memiliki relevansi dengan penjelasan Collier dalam Lawang (2004) bahwa modal sosial seharusnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan harus mampu membuat pertumbuhan yang terjadi dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan sosial, tidak saja pihak yang masuk dalam lingkaran persahabatan (kelompok) secara khusus, tetapi tennasuk masyarakat secara luas. Artinya bahwa peran modal sosial terhadap kesejahteraan adalah terlebih dahulu melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, karena terkait dengan modal yang dimiliki yang bersifat sosial maka kesejahteraan yang

hendak dicapainya adalah kesejahteraan sosial bukan individu. Pertumbuhan ekonomi yang maju di dalam wilayah kelompok masyarakat pesisir diharapkan dapat berdampak pada kesejahteraan sosial masyarakat tersebut.

Sebetulnya kesejahteraan sosial yang dicapai masyarakat pesisir tidak secara parsial dipengaruhi oleh kekuatan modal sosial semata. Keterlibatan pemberdayaan masyarakat sebagai penguat keberadaan modal sosial dalam masyarakat pesisir peranannya turut memberikan sumbangan di dalam meningkatkan kesejahteraan yang dicapai masyarakat pesisir, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat mendorong modal sosial menjadi lebih baik dan modal sosial yang semakin baik mendorong peningkatan kesejahteraan. Hal ini nampak jelas bahwa modal sosial selain secara langsung dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan sosial masyarakat pesisir, juga ternyata dapat menjadi full mediation bagi hubungan antara pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan. Hubungan ini akan dibahas lebih detail pada sub bab selanjutnya tentang pengaruh pemberdayaan EMP terhadap kesejahteraan melalui modal sosial. Pada sub bab ini khusus membahas pengaruh modalsosial terhadap kesejahteraan sehingga berdasarkan hasil analisis dan pembahasannya di atas dapatlah disimpulkan bahwa pencapaian kesejahteraan masyarakat pesisir adalah diperankan oleh keberadaan modal sosial yang dimiliki masyarakatnya, yaitu kuatnya keterdukungan unsur-unsur

pokok dari modal sosial itu sendiri yang meliputi timbal balik, norma, jaringan, kepercayaan, dan kelompok.

Hasil studi ini sejalan dengan beberapa riset yang dilakukan peneliti asing (luar negeri), antara lain temuan Narayan dan Pritchett (1999) yang melakukan penelitian tentang “*cent and sociability: Household Income and Social Capital in Tanzania*”, menemukan bahwa meningkatnya satu persen standar deviasi dari indeks modal sosial akan meningkatkan 20 persen pengeluaran rumah tangga per kapita. Dengan demikian modal sosial adalah sangat penting untuk menganalisa pendapatan dan kemiskinan, yang jika diabaikan dapat menghasilkan “*missing a large part of the poverty puzzle*”. Selain itu, hasil penelitian mereka menunjukkan bagaimana modal sosial mampu menghasilkan *spillover effect* (efek lebih lanjut) dan membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

Demikian halnya dengan penelitian Grootaert (1999) yang membahas mengenai hubungan antara modal sosial, kesejahteraan keluarga miskin di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ada tiga dimensi yang paling berpengaruh terhadap tingkat pengeluaran keluarga yaitu indeks kepadatan keanggotaan dalam organisasi/kelompok, heterogenitas internal dan tingkat keaktifan dalam pengambilan keputusan. Hasil pendugaan model regresi juga menginformasikan bahwa tingginya modal sosial disamping berpengaruh positif terhadap tingkat pengeluaran keluarga, juga berpengaruh positif terhadap asset, akses kredit, saving dan kemungkinan meningkatkan pendidikan anak.

Narayan and Cassidy (2001) dalam penelitiannya yang berjudul “*A Dimensional Approach to Measuring Social Capital: Development and validation of a social capital inventory*” di Republik Ghana dan Uganda pada musim panas tahun 1995. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dari data yang didapatkan dari 2 negara yang berbeda kondisinya tersebut ternyata modal sosial memiliki peran penting bagi kesejahteraan masyarakat. Optimisme kepuasan terhadap hidup, persepsi tentang institusi pemerintah dan keterlibatan politik semuanya sangat dipengaruhi oleh dimensi dasar dari modal sosial, kepercayaan, ketelibatan dalam komunitas, keterlibatan sosial, kerja sukarela dan bisa memberikan pengaruh baik positif maupun negatif terhadap sikap dan perilaku. Perbedaan tingkat modal sosial di Ghana dan Uganda bisa menjelaskan mengapa terjadi perbedaan level ekonomi antara masyarakat di kedua negara tersebut. Namun untuk melakukan verifikasi secara empiris terhadap dugaan ini masih diperlukan penelitian lebih lanjut.

Selanjutnya Van Ha, dkk (2004) meneliti tentang kontribusi modal sosial dengan output rumah tangga di Vietnam. Hasil dari penelitian mereka menunjukkan bahwa (1) Modal sosial memiliki kontribusi yang besar dan positif bagi pendapatan rumah tangga: (2) Kontribusi positif dari modal sosial bagi pendapatan rumah tangga kelompok miskin di desa pengrajin daur ulang kertas adalah lebih besar daripada bagi rumah tangga kelompok kaya di desa yang sama, (3) jumlah keanggotaan dalam

asosiasi pengrajin daur ulang kertas tidak memiliki dampak terhadap pendapatan rumah tangga.

Sedangkan untuk riset-riset lokal yang dilakukan peneliti-peneliti dalam negeri, hasil penelitian ini juga sejalan dengan beberapa dari hasil riset tersebut, antara lain temuan Kamami (2010) tentang pengaruh modal sosial terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Minangkabau, yang menemukan bahwa modal sosial dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kemampuan masyarakat tersebut, tidak sekedar jumlah tetapi kehidupan masyarakat yang lebih berani. Jadi peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa dicapai jika ada kemauan dan keinginan dari masyarakat tersebut untuk meningkatkan modal sosialnya. Dalam level mikro, hal serupa dikemukakan Alfiasari (2008) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Modal Sosial dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin di Kelurahan Kerdung Jaya, Kec. Tanah Sereal Kota Bogor bahwa modal Sosial (kepercayaan, jaringan, norma sosial mempunyai hubungan Signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga. Manzilati (2009) dalam penelitiannya yang berjudul Tata Kelola Kelembagaan (Institusional Arrangement) Kontrak Usaha Tani Dalam Kerangka Persoalan Keagenan (Principal Agent Problem) dan implikasinya Terhadap Kebelanjutan Usaha Tani. Hasil penelitian Manzilati (2009) yang paling relevan dengan temuan penelitian ini adalah bahwa kepercayaan sebagai unsur dalam modal Sosial dalam kelompok tidak

hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga keberlanjutan usaha tani.

Sedangkan level makronya, Bastelaer (2002) menyatakan bahwa modal sosial berpengaruh terhadap pembangunan. Dari hasil penelitian ini dengan sejumlah dukungannya terhadap penelitian-penelitian terdahulu, semakin memberikan penguatan konsep untuk modal sosial sebagai faktor yang patut menerangkan kemajuan dalam pembangunan kesejahteraan suatu masyarakat, sehingga dalam hal ini Bank Dunia (World Bank, 2001), juga menggunakan konsep modal sosial untuk menerangkan berbagai kemajuan dalam pengentasan kemiskinan.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa terlepas dari cakupannya yang terdiri atas level mikro dan makro, modal sosial dalam mempengaruhi pembangunan merupakan hasil interaksi jenis modal sosial, yaitu interaksi modal sosial struktural dan kognitif. Modal sosial struktural memfasilitasi pembagian informasi, tindakan bersama dan pengambilan keputusan bersama melalui posisi/ peran yang telah mapan, jaringan sosial dan struktur sosial lainnya yang ditambah dengan aturan-aturan, prosedur dan tata cara (Andromeda, 2008). Selanjutnya, konsekuensi jenis interaksi modal sosial ini relatif lebih obyektif dan dapat diobservasi. Adapun modal sosial kognitif menunjuk pada norma-norma yang dibagikan, nilai-nilai, kepercayaan, perilaku dan perasaan dan sikap, dan kepercayaan agama, maka interaksi modal sosial kognitif ini lebih subyektif dan konsepnya adalah

itangible (tidak kelihatan) (Andromeda, 2008). Uraian-uraian di atas menerangkan bahwa, kesejahteraan masyarakat pesisir sebagai salah satu ukuran pembangunan di bidang pengentasan kemiskinan, keberhasilannya lebih dominan diperankan oleh kekuatan dimensi-dimensi modal sosial tersebut, baik dari sisi struktural yang lebih bersifat obyektif maupun sisi kognitif yang bersifat subyektif.

Terkait dengan temuan hasil penelitian ini, maka berdasarkan hasil wawancara terbuka dengan beberapa responden informan terungkap bahwa keberhasilan masyarakat pesisir di dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan yang ditandai dengan jumlah hasil tangkapan dan akses penjualannya adalah akibat dari hubungan yang terjalin dengan baik antar pihak kelompok masyarakat nelayan secara internal dan dengan pihak perusahaan (pembeli/ konsumen).

Sehingga dengan jaringan atau hubungan kerja yang baik tersebut semakin mengefisienkan dan mengefektifkan proses kerja sampai pada hasil akhir yaitu penjualan. Sebagaimana penuturan responden informan Muzamil (Pedagang, 35Tahun), berikut:

“Nelayan harus tergabung dalam suatu jaringan. Karena jaringan membantu nelayan dalam memasarkan ikan dan barang tangkapan lainnya.”

Penuturan informan di atas, memberikan gambaran bahwa berkat kerja sama dengan pihak-pihak lain dapat membantu proses penjemputan dan penjualan hasil tangkapan secara lebih efisien dan efektif, sehingga hasil

penjualan bisa lebih dioptimalkan. Efisiensi dan efektivitas kerja biasanya diukur berdasarkan optimalisasi penggunaan input (sumber daya). Penggunaan sumber daya yang optimal akan menghasilkan output yang optimal sebab biaya transaksi dan biaya kendali dapat ditekan seminimal mungkin. Hal ini dijelaskan oleh Mangkuprawira (2010) tentang hubungan modal sosial positif dengan kesejahteraan masyarakat. Modal sosial yang baik memberikan efek positif pada cara kerja yang lebih baik dan profesional, salah satunya menjalin hubungan kerja yang baik secara internal dan juga eksternal sebagaimana disebutkan di atas. Jika output yang dihasilkan lebih besar maka hal itu dapat meningkatkan penghasilan para nelayan sehingga kesejahteraan masyarakat pesisir secara umum juga bisa meningkat.

Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat pesisir terbagi atas nelayan penuh, nelayan sambilan utama, dan nelayan sambilan tambahan. Selain itu terdapat pula masyarakat pesisir yang bukan nelayan tapi bekerja sebagai pengecer hasil tangkapan untuk dijual ke pasar atau kepada penjual ikan keliling. Hal ini lazim juga dilakukan oleh nelayan sambilan tambahan yang memang lebih banyak waktu berada di darat dari pada di laut. Keberadaan para pengecer dan nelayan sambilan tambahan ini sangat menguntungkan para nelayan penuh dan nelayan sambilan utama di dalam memasarkan hasil tangkapannya, sehingga jika para pengecer kekurangan modal (uang) untuk membeli ikan hasil tangkapan

nelayan, maka mereka tetap boleh menerima ikan hasil tangkapan untuk dijual ke pasar dengan pembayaran di belakang. Hal ini nampak bahwa diantara masyarakat pesisir nelayan dan bukan nelayan atau setengah nelayan (pengecer) memiliki rasa saling percaya dan kebersamaan sehingga kerja sama yang baik mudah dilakukan, sebagaimana penuturan informan Tugirin (Pedagang Ikan, 65 Tahun), berikut:

“Saya dan beberapa teman pedagang ikan saling percaya dalam bekerja sama dengan para nelayan. Beberapa dari mereka ada juga yang saya bayar ikannya belakangan kalau saya tidak punya uang untuk membayar di depan. Jadi, titip, laku, saya bayar ke nelayannya.”

Bisa dibayangkan yang akan terjadi pada ikan hasil tangkapan jika rasa kebersamaan dan saling percaya tidak tumbuh dalam masyarakat. Di satu sisi produksi ikan mentah merupakan barang cepat rusak dan bisa membutuhkan biaya tambahan yang tidak sedikit, seperti pengasapan jika tidak segera didistribusi ke pasar atau dijual, dan di sisi lain, tidak sedikit di antara para pengecer yang memiliki kesediaan dana yang cukup untuk membayar di muka ikan hasil tangkapan nelayan, sehingga mau tidak mau untuk menghindari resiko kerusakan (busuk) dan biaya pengasapan maka para nelayan harus menyerahkannya kepada para pengecer dengan pembayaran di belakang, walaupun sistem pengasapan tetap dilakukan jika hasil tangkapan melimpah, dimana pada saat-saat seperti itu terjadi excess supply, yaitu penawaran ikan lebih tinggi daripada permintaannya di

pasar, sehingga satu-satunya cara untuk mengatasi hal tersebut adalah mengawetkan ikan tersebut dengan cara pengasapan.

Sistem kekerabatan dalam pola kerja sama seperti ini sudah berangsur lama dan merupakan salah satu modal sosial yang terbukti telah memberikan solusi dari masalah-masalah yang dihadapi sehingga bisa menghantarkan masyarakat pesisir menjadi lebih sejahtera. Dari uraian-uraian di atas, nampak jelas bahwa penelusuran secara kualitatif dilapangan memiliki relevansi dengan hasil yang diperoleh secara kuantitatif, sehingga dalam hal ini dapatlah disimpulkan bahwa modal sosial memang benar-benar memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan, yakni mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Meranti dan Rokan Hilir.

Tanggapan Responden

Pengaruh kelompok nelayan juga besar dalam kesejahteraan mereka. Menurut Ilyas nelayan di Merbau, kelompok nelayan sangat membantu mereka dalam berusaha. Ini terbukti para nelayan sering meminjam modal usaha kepada ketua kelompok mereka dalam melaksanakan usahanya. Sedangkan pembayaran pinjaman dilakukan setelah dipotong dari penangkapan ikan yang telah dilakukan mereka. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Agel di Tanah Merah. Menurutnya kebanyakan nelayan untuk mencukupi kebutuhan saat tangkapan sedikit mereka meminjam kepada bos nelayan.

Dana pinjaman yang dilakukan selama ini dari dana kelompok atau dana sendiri.

4. Pengaruh Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir terhadap Kesejahteraan Melalui Modal Sosial

Walaupun pemberdayaan EMP secara langsung belum mampu memerankan keikutsertaannya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kabupaten Meranti dan Rokan Hilir, namun realitas menunjukkan bahwa pengaruh pemberdayaan EMP terhadap kesejahteraan secara tidak langsung yaitu melalui peran modal sosial adalah cukup kuat. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien jalur atau pengaruh tidak langsung (PTL) sebesar 0,146. Angka tersebut secara statistik bermakna bahwa PTL dari program PEMP telah mampu memberikan kontribusi positif yang cukup nyata terhadap peningkatan kesejahteraan melalui penguatan modal sosial, serta mampu menaikan efek total dari tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi sebesar 41,2 persen (0,412). Hal ini memberi makna bahwa melalui modal sosial yang dimiliki masyarakat pesisir, maka program pemberdayaan EMP bisa berhasil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut.

Hasil Penelitian ini memberikan implikasi bahwa modal sosial yang tumbuh dalam masyarakat pesisir memiliki peranan yang sangat penting di dalam memediasi program pemberdayaan EMP untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut. Jadi

keberhasilan program pemberdayaan EMP didalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh peran modal sosial. Artinya, bahwa tanpa modal sosial yang kuat program pemberdayaan EMP tidak mampu berperan nyata terhadap kemajuan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kabupaten Meranti dan Rokan Hilir. Mula-mula modal sosial mendapatkan daya rangsang dan motivasi dari program pemberdayaan EMP disatu sisi, sehingga dengan adanya daya rangsang tersebut modal sosial menjadi semakin baik. Kemudian dengan modal sosial yang semakin baik, kesejahteraan masyarakat dapat lebih meningkat disisi lain.

Fukuyama (2000) menunjukkan hasil-hasil studi di berbagai negara bahwa modal sosial yang kuat akan merangsang pertumbuhan berbagai sektor ekonomi karena adanya tingkat rasa percaya yang tinggi dan kerekatan hubungan dalam jaringan yang lebih luas tumbuh antar sesama pelaku ekonomi. Hasil-hasil studi tersebut tidak lain adalah menjelaskan tentang peranan modal sosial di dalam menumbuhkan sektor ekonomi yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan.

Sebetulnya terdapat hubungan kausalitas antara pemberdayaan dan modal sosial, di mana keduanya saling berperan terhadap satu sama lain dan kemungkinan interaksi hubungan inilah yang kemudian berdampak positif pada peningkatan status kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hanyasaja, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa penelitian ini hanya melihat peranan pemberdayaan terhadap modal sosial. Namun demikian,

dari peran satu arah tersebut telah cukup mampu memberikan dampak positif yang nyata terhadap peningkatan kesejahteraan.

Peran mediasi modal sosial pada pengaruh pemberdayaan EMP terhadap kesejahteraan dalam hasil penelitian ini, belum banyak didukung oleh riset-riset terdahulu. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya penelitian tentang pemberdayaan dan modal sosial khususnya di Indonesia yang menyoroti peran pemberdayaan terhadap modal sosial. Penelitian terbaru yang dilakukan Yuliarmi (2011), justru menyoroti hal yang terbalik, yaitu peran modal sosial terhadap pemberdayaan IKM dan peran mediasi pemberdayaan IKM pada pengaruh modal sosial terhadap kesejahteraan pengrajin di Provinsi Bali. Oleh karena itu, hasil penelitian tentang peran mediasi modal sosial pada pengaruh pemberdayaan EMP terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir merupakan temuan penting dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan dari beberapa responden informan, ditemukan bahwa hubungan kerja sama yang baik dan tingginya rasa saling percaya diantara nelayan telah memberikan kontribusi sosial dan ekonomi secara luas dalam masyarakat pesisir. Keduanya, yaitu hubungan kerja sama yang baik dan rasa saling percaya merupakan modal sosial, yang dalam penelitian ini disebut sebagai *Reciprocity* dan *Trust*, merupakan landasan utama masyarakat pesisir di dalam melakukan aktivitas baik sebagai pelaku ekonomi maupun sebagai bagian dari makhluk sosial yang hidup

bermasyarakat. Hal ini sesuai dengan makna penuturan responden informan Musliadi (Nelayan, 62 tahun) sebagai berikut:

“Program PEMP menurut saya harus berfokus pada kesejahteraan masyarakatnya. Dengan sikap saling menghormati dan saling mempercayai, akan masyarakat tercipta masyarakat yang bertenggang rasa. Masyarakat yang seperti itu sangat mendukung keefektifan program pemberdayaan ekonomi dalam mencapai tujuannya yakni mensejahterakan masyarakat pesisir secara merata.”

Sikap timbal balik dan saling percaya di antara para nelayan memang merupakan faktor utama yang mendorong masyarakat bisa bekerja dengan baik dan optimal sehingga bisa memperoleh hasil maksimal pula. Di dalam masyarakat Meranti dan Rokan Hilir secara umum memiliki budaya kerja. Kelompok kerabat ini menjalankan fungsi-fungsi sosialnya secara korporasi yang diwujudkan dalam bidang ekonomi, misalnya bantu membantu dalam pengolahan tanah atau sumber daya alam lainnya, sedangkan dalam bidang pendidikan dan kesehatan, misalnya ramai-ramai memberi sumbangan kepada anggota yang memerlukan bantuan pendidikan anaknya atau biaya perawatan di rumah sakit. Selanjutnya, adalah aturan-aturan yang telah disepakati bersama yang digunakan dalam berkomunikasi secara sosial antar anggota kelompok masyarakat, termasuk hubungannya dengan aktivitas ekonomi yang memiliki sanksi-sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan

penuturan responden informan M. Ali (Nelayan, 36 tahun) sebagai berikut:

“Misalkan ada nelayan suatu anggota kelompok yang melanggar adat masyarakat atau aturan kelompok, maka nelayan tersebut harus siap mendapat sanksi masyarakat, contohnya dikeluarkan dari kelompok nelayan.”

Dari penuturan responden informan diatas, terungkap bahwa didalam kerja kelompok ada aturan-aturan (norma) yang disepakati dan harus ditaati. Pelanggar norma tersebut akan mendapatkan sanksi berupa hilangnya kepercayaan dan bahkan bisa dikeluarkan dari anggota kelompok walaupun nelayan tersebut merupakan bagian dari kelompok kerabat. Disini nampak bahwa walaupun kelompok kerja adalah bagian dari kelompok kekerabatan, namun di dalam melakukan fungsi-fungsi sosial seperti aktivitas ekonomi dari para nelayan tetap dituntut untuk profesional dalam arti mentaati aturan-aturan khusus yang telah ditetapkan bersama.

Segala aktivitas yang dilakukan oleh seorang individu atau kelompok masyarakat tertentu tujuan materialnya adalah untuk memenuhi segala kebutuhan di dalam rangka mensejahterahkan diri, keluarga dan masyarakatnya sesuai dengan level sosial yang disandangnya. Masyarakat pesisir Meranti dan Rokan Hilir dengan budaya atau kebiasaannya sebagai modal sosial yang menopang setiap aktivitas yang dilakukan. Sudah menjadi kelaziman atau sunatullah bahwa hasil yang akan dicapai adalah sesuai dengan usahanya (proses

kerja), sehingga jika masyarakat pesisir berhasil mensejahterahkan dirinya adalah tidak lepas dari usaha atau proses yang dilakukannya. Nampaknya modal sosial disatu sisi merupakan faktor yang berperan penting di dalam proses kerja atau usaha meningkatkan kesejahteraan, Sementara program pemberdayaan masyarakat di sisi lain adalah bagian yang penting sebagai faktor motivasi terhadap pembentukan dan pemeliharaan modal sosial itu sendiri.

Uraian diatas memberikan makna bahwa pemberdayaan masyarakat tidak lain adalah motivator langsung terhadap modal sosial, dan modal sosial merupakan penopang proses kerja didalam usaha mencapai kesejahteraan. Sehingga sangat jelas disini bahwa program pemberdayaan masyarakat bisa, berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika masyarakat tersebut memiliki modal sosial yang tinggi, sebagai mana modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat pesisir Meranti dan Rokan Hilir tersebut di atas.

5

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir yang dilaksanakan di Provinsi Riau melalui pemberian modal usaha, keberadaan Solar packed Dealer untuk Nelayan (SPDN), pendirian kedai pesisir dan Lembaga Keuangan Mikro telah mampu meningkatkan modal sosial masyarakat pesisir di daerah ini. Pemberian modal usaha dan kemudahan mengakses kebutuhan bahan bakar minyak, keberadaan kedai pesisir dan Lembaga Keuangan Mikro telah memotivasi dan meningkatkan semangat yang tinggi para nelayan, pekerjaan dapat dengan mudah dilakukan secara bersama sama. Program PEMP tersebut memberikan penguatan jaringan keriasama, nelayan, saling percaya dalam

bekerja, sikap saling bantu membantu, kebersamaan dalam kelompok dan kepatuhan terhadap norma norma yang ada dalam masyarakat Pesisir.

2. Modal sosial masyarakat pesisir di Kabupaten Meranti dan Rokan Hilir secara keseluruhan memiliki eksistensi yang baik berdasarkan penilaian pada persepsi masyarakat pesisir terhadap modal sosial itu sendiri. Jaringan merupakan pembentuk modal sosial yang dominan diikuti dengan kepercayaan, saling bantu membantu, partisipasi kelompok dan norma. Tingginya dimensi jaringan pemasaran antara nelayan, pengusaha, pedagang eceran dan pengasap ikan mempengaruhi kinerja kegiatan usaha kelompok. Jaringan semakin baik karena diperkuat saling kepercayaan diantara anggota, saling bantu membantu, partisipasi kelompok dan patuh terhadap aturan yang berlaku (norma). Keberadaan dimensi-dimensi modal sosial tersebut telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kabupaten Meranti dan Rokan Hilir. Implikasinya jika modal sosial semakin baik dan menguat maka hal itu akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
3. Tingkat penghidupan yang telah dicapai oleh masyarakat pesisir selama ini secara umum dapat dikategorikan sudah sejahtera, hal ini ditandai dengan persepsi mereka terhadap kesejahteraan yang secara umum menyatakan baik. Pencapaian kesejahteraan tersebut terutama disebabkan oleh

keberadaan modal sosial, sedangkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir secara langsung belum berperan nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya peran kedai pesisir dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pesisir, demikian pula peran Lembaga Keuangan Mikro masih perlu perbaikan dalam pengelolaannya.

4. Program PEMP yang dilaksanakan di Kabupaten Meranti dan Rokan Hilir selama ini secara tidak langsung telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan modal sosial yang tumbuh dalam masyarakat. Melalui modal sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir telah mampu menaikkan efek sejahtera yang diperoleh nelayan sehingga hal tersebut menjadi alasan utama mengapa program PEMP khususnya di wilayah pesisir Meranti dan Rokan Hilir masih sangat urgen untuk dilaksanakan.

B. Saran-saran

Berdasarkan temuan dan hasil penelitian serta permasalahan pokok yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapatlah dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan mengaktifkan dan meningkatkan program PEMP ini baik dari aspek kualitas maupun perluasan program melalui program

bantuan lainnya. Pemberian modal usaha dan pembangunan Solar Packed Dealer untuk Nelayan (SPDN) untuk wilayah pesisir yang terisolir tetap diharapkan oleh masyarakat pesisir. Melalui peningkatan program tersebut akan semakin memberikan motivasi terhadap masyarakat pesisir, menumbuhkan semangat kerja dan membangkitkan potensi modal sosial yang tumbuh dan berakar dalam masyarakat pesisir.

2. Kepada masyarakat pesisir didaratan Kabupaten Meranti dan Rokan Hilir untuk meniaga dan mempertahankan kelestarian budaya sebagai unsur kekuatan modal sosial yang menopang dan merespon program-program pembangunan seperti program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, yang pada gilirannya berimplikasi terhadap peningkatan kesejahteraan.
3. Diharapkan kontinuitas program, penambahan jumlah dana ekonomi produktif (DEP) dan bimbingan masyarakat, yaitu: (1) setiap wilayah pesisir hendaknya mendapatkan DEP setiap tahun atau minimal setiap dua tahun sekali dengan jumlah DEP yang lebih besar sehingga bisa menunjang usaha mereka, (2) Pendampingan tidak hanya pada saat sampai pada peguliran dana tetapi, tetapi diharapkan selama program berjalan. (3) Ada persyaratan khusus yaitu tingkat pendidikan. Keterampilan, kecakapan, atau memiliki pengetahuan, pengalaman yang berkaitan dengan pengelola Lembaga Keuangan Mikro dan

Kedai Pesisir, sehingga kelompok masyarakat pesisir didalam menentukan pengelola kedua unsur tersebut adalah dengan berdasarkan persyaratan yang ada, (4) bimbingan pelatihan sangat diperlukan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya kepada pengelola kedai pesisir dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) agar penanganannya bisa lebih profesional. Profesionalisme pengelolaan kedua unsur program PEMP tersebut diyakini dapat meningkatkan produktivitas kerja nelayan.

Kuatnya peran mediasi dari modal sosial pada pengaruh program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir terhadap kesejahteraan maka Program PEMP tidak hanya diharapkan dari pemerintah, namun keterlibatan Lembaga Non Pemerintah dalam hal ini lembaga Swadaya masyarakat (LSM) diharapkan untuk senantiasa mempertahankan dan meningkatkan perannya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Biodata Penulis

Dr. Andreas, CPA., CA adalah star pengajar tetap pada Program S1 Akuntansi, Program Magister Manajemen, Program Magister Akuntansi, Program Magister Sains Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Riau, sekaligus menjadi *Managing Partner* Kantor Akuntan Publik Hadibroto & Rekan sejak tahun 2003 hingga kini. Pengalaman audit diperoleh dari Kantor Akuntan Publik yang sama sejak tahun 1989. Selain itu, penulis pernah bekerja sebagai internal auditor pada Raja Garuda Mas Group di Medan dan sebagai Wakil Ketua bidang Akuntan Publik Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Riau. Penulis juga aktif sebagai pembicara pada berbagai konferensi internasional.

Dr. Enni Savitri, SE, MM.Ak. adalah dosen tetap pada jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau sejak tahun 2008, lahir di Pekanbaru. Pendidikan Sarjana Ekonomi dan Akuntansi (SE) diselesaikan pada jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Riau (1998). Pendidikan Masternya diselesaikan di Magister Manajemen (MM) Universitas Riau (2004) dan meraih gelar Doktor pada Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang (2012). Selain itu, penulis juga sebagai staf pengajar pada Magister Manajemen dan Magister Sains di Universitas Riau.

Daftar Pustaka

- Abu Samah, Asnarukhadi dan Fariborz Aref. 2009. *Empowerment as an Approach for Community Development in Malaysia*. World Rural Observations 2009;1.2;63-68.
- Anggoro. 2009. *Pengaruh Modal Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Dan Bantuan Sosial Terhadap Ketahanan Usaha*. Karya Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Bourdieu, P. (1983). 'Forms of capital' in J. C. Richards (ed.). *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, New York: Greenwood Press. Dikutip dari situs www.google.com – *social capital: civic community and education/social_capital*
- Bryant, C, White. L, 1987. *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang, LP3ES, Jakarta*. Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- Coleman, J. 1999. *Social Capital in The Creation of Human Capital*. Cambridge Mass: Harvard University Press.
- Devi, L.V. Ratna. 2007. *Ikatan Solidariats, Keberdayaan Usaha, Dan Ketahanan Usaha Kelompok Etnis Pedagang Tekstil Pasar Klewer Surakarta*. Tesis : Pascasarjana. UNS.
- Freire, Paulo. 1992. *Pedagogy of The Oppressed*. Harmondsworth : Penguin Books, Inc.

- Fukuyama S. 2000. *An Institutional Framework For Japanes Crisis Management*. Journal of contingencies and crisis management 8.1.:3-14.
- Fukuyama, F. 2000. *Social Capital, Civil Society, and Development*. Third Word Quarterly, 22 (1):7-200
- Grootaet, C. 1999. *Social Capital, Household Welfare and Poverty in Indonesia*. Local Level Institutions Working Paper No. 6 World Bank
- Hasbullah, Jaousairi. 2006. *Social Capital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia*. Jakarta: MR-United Press.
- Hikmat, Harry. 2001. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama.
- Kartasasmita, Ginandjar. *Power and Empowerment : Sebuah Telaah Mengenai Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. Pidato Kebudayaan yang disampaikan pada Hari Jadi ke-28 Pusat Kesenian Jakarta-Taman Ismail Marzuki. Jakarta, 19 November 1996
- Kusnadi. 2002. *Polemik Kemiskinan Nelayan*. Jogjakarta: Pustaka Jogja Mandiri
- Lawang, R. 2004. *Kapital Sosial: Dalam Perspektif Sosiologik*. Fisip UI Press. Jakarta
- Mubyarto dan Sartono Kartodirjo. *Pembangunan perdesaan di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 1981.

- Mariana, 2008. *Peranan Bantuan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Terhadap Pengentasan Kemiskinan Keluarga Nelayan Di Keluraan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat.*
- Narayan, D dan Pritchett, L. 1999. *Cent and Sociability: Household Income and Social Capital in Tanzania.* Economics Development and Culture Chang 47 (4, July) 871-79.
- Narayan, Deepa, and Michael F. Cassidy. 2001, "A Dimensional Approach to Measuring Social Capital: Development and Validation of Social Capital Inventory". Current Sociology 49, pp, 59-102
- Nasution, Zahri. 2007. *Sosial Budaya Masyarakat Nelayan-Konsep Dan Indikator Pemberdayaan.* Penerbit Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan Jakarta.
- Parkins, Douglas. D; Zimerman and Marc A. in *American Journal of Community Pshicology*; Oct 1995; 23, 5; Research Library Core pg. 595 dikutip dari www.people.vanderbilt.edu/~douglas.d.perkins/empintr.o.proquest.pdf
- Pearse, Andrew dan Michael Stiefel. 1979. *Inequality Into Participation: A Research Approach,* Geneva, UNRISD.
- Portes, A. 1988. *Social Capital: is Origins And Applications In Modern.* Sociology Annual, Review of Sociology, 1-24

- Prijono dan A.M.W Prakarna. Eds. 1996. *Pemberdayaan: konsep, kebijakan dan implementasi*, CSIS, Jakarta, Hal 44-4.
- Putnam, R.D. 1993. *The Prosperous Community: Social Capital and Public Life*. American Prospect, 13, Spring, 35-42. In Elinor.
- Putnam, R. D. 1995. 'Bowling Alone: America's Declining Social Capital', *Journal of Democracy* 6:1, Jan, 65-78 dikutip dari www.eaglenet.lambuth.edu
- Qomariah. 2009. *Pengaruh modal sosial terhadap kinerja LKMS dan kesejahteraan masyarakat pada LKMS di Pondok pesantren Sidogiri Pasuruan, Jawa Timur*. Disertasi PPS-UB Malang.
- Ridwan. 2008. *Mistisme Simbolik dalam Tradisi Islam Jawa*. *Ibda'* Vol. 6 No. 1 91-109.
- Rostin. 2012. *Pengaruh Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dan Modal Sosial terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pesisir di Provinsi Sulawesi Tenggara*. Disertasi Universitas Brawijaya
- Saefuddin, dkk. 2003. *Menuju Masyarakat Mandiri (Pengembangan Model Sistem Keterjaminan Sosial)*, Jakarta, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sakata, S. 2002. *What is Social Capital? In: Social Capital and International Cooperation*. Tokyo: Japan International Cooperation Agency in Japanese.

- Suharto, Edi. 2006. *Modal Sosial dan Kebijakan Publik*
- Suharto. E. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakana Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Rafika Aditama.
- Sutrisno. L. 1999. *Kemiskinan, Perempuan, dan Pemberdayaan*. Kanisius, Yogyakarta.
- Syakra, Rusdi dkk. 2000. *Anomi Dan Modal Sosial : Memahami Krisis Multi Dimensional*. Jakarta: Puslitbang Kemasyarakatan Dan Budaya-LIPI.
- Usman, S. 1995. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Utomo, W. dan Tri Widodo.2004. *Beberapa Permasalahan Dan Upaya Akselerasi Program Pemberdayaan Masyarakat*. Nagoya University.
- Wahyono, Ary, Sudiyono, dan Fadjar Ibnu Thufail, 1993. *Hak Ulayat Laut Desa Para Kecamatan Manganitu, Sangihe Taulud*. Jakarta, Puslitbang Kemasyarakatan dan Kebudayaan dan Kebudayaan LIPI.
- Woolcock, Michael, 2001. *Microentreprise and Social Capital: A Framework for theory, research and policy*. The journal of Socio-Economics, Elsevier, Vol 30.2.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir. 2013. *Rokan Hilir dalam Angka 2013*.